



CAKRAWALA KEBANGSAAN

Rumah Besar Cendekiawan

TANTANGAN
TRANSFORMASI PANCASILA
DALAM PEMBANGUNAN
MANUSIA INDONESIA
MERDEKA

MERDEKA DARI MENTAL
BURUH; SAATNYA
INDONESIA JADI BANGSA
PENGUSAHA

MERDEKA YANG BELUM
SELESAI; PARADOKS
MANIFESTO MANUSIA
INDONESIA

INOVASI SAINS DAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
MEWUJUDKAN KETAHANAN
PANGAN NASIONAL

EXPERIENCE STORY SEBAGAI
PENERIMA PROGRAM
DANA DARMA PANCASILA

MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA MERDEKA



TESTIMONI
PENERIMA
BANTUAN DANA
PENELITIAN
DDP BATCH #3



Cakrawala Kebangsaan

Rumah Besar Cendekiawan

PENERBIT

Aliansi Kebangsaan

PEMIMPIN UMUM

Pontjo Sutowo

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Ahmad Zacky Siradj

PEMIMPIN REDAKSI

Ansel Da Lopez

SEKRETARIS REDAKSI

Nofia Fitri

DEWAN REDAKSI

I Dewa Putu Rai

Prasetijono Widjojo MJ

Manuel Kaisiepo

Wisnubroto Baron

REDAKTUR PELAKSANA

Nofia Fitri

Yuli Astuti Tyas

Irma Khairani

SEKRETARIAT

Nova Fitri

Indri Ayu

Edisi REVISI

SALAM KEBANGSAAN

- Membangun Manusia Indonesia Merdeka 1
Reaktualisasi Politik Luar Negeri “Bebas-Aktif” 2

OPINI

- Indonesia: Mau Maju atau Terjebak dalam Pragmatisme?** 5
Prasetijono Widjojo MJ
- Merdeka dari Mental Buruh: Saatnya Indonesia Jadi Bangsa Pengusaha** 7
Susetya Herawati
- Tantangan Transformasi Pancasila dalam Pembangunan Manusia Merdeka Indonesia** 9
Didin S. Damanhuri
- Koperasi Kuantum sebagai Institusi Pemertdekaan Ekonomi Indonesia** 11
Agus Pakpahan
- Merdeka yang Belum Selesai: Paradoks Manifesto Manusia Indonesia** 16
D. Bagiono
- Berkeadilan Inti Bernegara** 17
Ahmad Zacky Siradj
- Experience Story sebagai Penerima Program DDP** 18
Ade Husna
- Inovasi Sains dan Teknologi Pertanian Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional** 20
Retno Sri Endah Lestari
- Manusia Indonesia Merdeka di Era Digital** 22
Laode Masihu Kamaluddin
- Sekolah Kebangsaan BINEKA** 25
Ansel Da Lopez

NEWS

- Testimoni Penerima Bantuan Dana Penelitian Dana Darma Pancasila Batch #3** 27
- Pelatihan Tiga Ranah Pancasila** 37

KOLOM YUDI LATIF

- Dari Negara Non-Blok Menuju Negara Go-Blok** 39
- Kepemimpinan Moral** 40
- Demokrasi Dekaden** 41

SALAM KEBANGSAAN

Membangun Manusia Indonesia Merdeka

Judul di atas menarik: Membangun Manusia Indonesia Merdeka. Apakah Indonesia dan manusia yang mendiaminya sekarang belum merdeka? Secara politik, Republik Indonesia telah merdeka sebagai negara saat Proklamasi tahun 1945. Namun, setelah 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar yang belum selesai, yakni membebaskan diri dari mental bangsa terjajah. Manusia Indonesia, termasuk sebagian besar elitnya, terus hidup dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam warisan perbudakan mental-kejiwaan, tidak bisa berpikir kritis. Padahal, mental-kejiwaan adalah pusat eksistensi manusia.

Dari sinilah lahir kemampuan untuk berpikir, mengingat, menalar, membayangkan masa depan, mengambil keputusan, dan mengarahkan tindakan kolektif. Penjajahan yang berlangsung lama telah merusak, bahkan mematikan kepercayaan diri, mengikis kemandirian dan mencabut manusia dari akar sejarah serta ruang hidupnya. Ketika mental manusia terpasung, kemerdekaan politik menjadi rapuh dan kemajuan ekonomi kehilangan arah moral.

Oleh karena itu, melalui berbagai diskusi dalam rapat kerja (raker) di Denpasar, Bali, pada akhir Januari 2026, Aliansi Kebangsaan mencetuskan Manifesto Manusia Indonesia Merdeka, dengan mengajak Manusia Indonesia untuk senantiasa Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, dan Bertindak Merdeka. Membebaskan diri dari kolonialisme mental. Aliansi Kebangsaan memandang bahwa mental kaum terjajah masih bercokol kuat hingga hari ini, sehingga manusia Indonesia masih sering memperlihatkan gejala kurang percaya diri, lemah pendirian, dan miskin kemandirian.

Mental kolonial tersebut menjelma dalam praktik penjajahan gaya baru. Jika kolonialisme lama merampas ruang melalui klaim "tanah tak bertuan" (*terra nullius*), maka kolonialisme pascakolonial merampas "ruang hidup rakyat atas nama investasi dan pembangunan". Tanah adat, hutan, pesisir, dan kampung warga disingkirkan, seolah-olah ruang itu tak bertuan. Negara yang seharusnya melindungi warga, justru sering bertindak sebagai fasilitator

perampasan. Masa depan Indonesia diperlakukan sebagai *tempus nullius* (waktu tak bertuan). Demi keuntungan jangka pendek, elite ekonomi dan politik bersekongkol merusak lingkungan, menguras sumber daya alam, menumpuk utang dan mengabaikan pembangunan kapabilitas manusia. Beban kerusakan, penderitaan, dan krisis diwariskan kepada generasi mendatang. Akibatnya, Indonesia kini terjebak dalam "kejangka-pendekan" (*short-termism*) kronis. Politik dikurung dalam siklus lima tahunan; kebijakan ditentukan oleh kepentingan elektoral, dan visi jangka panjang dikorbankan demi popularitas sesaat. Dalam bisnis, pertumbuhan dikejar dengan merusak lingkungan. Dalam bermedia, viralitas mengalahkan tanggungjawab.

Aliansi Kebangsaan bukan partai politik yang hanya memikirkan strategi lima tahunan, pemilu demi pemilu. Aliansi Kebangsaan adalah jejaring lintas budaya dan keyakinan yang memikirkan masa depan bangsa. Indonesia kini harus membangun Manusia Indonesia yang Merdeka untuk masa depan. Manusia Merdeka yang seharusnya mampu berpikir melampaui kedaruratan sesaat.

Manusia Merdeka bukan hanya manusia yang memiliki kemampuan mengingat masa lalu, namun manusia yang mampu merancang masa depan. Aliansi Kebangsaan meyakini bahwa Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Merdeka adalah agenda strategis Manusia Indonesia Merdeka, yakni manusia Indonesia yang mampu menguasai diri, berdiri sendiri, dan mengabdikan kapabilitasnya bagi kebaikan bersama dalam kebangsaan Indonesia.

Aliansi Kebangsaan sepenuhnya menyadari, gagasan membangun Manusia Indonesia Merdeka tentulah bukan hal yang mudah. Ini adalah pekerjaan besar dan jangka panjang. Karena itu sangat mengharapkan kontribusi pemikiran dan pendapat segenap organisasi dan cendekiawan di Tanah Air.

GAGASAN KEBANGSAAN

Reaktualisasi Politik Luar Negeri “Bebas-Aktif”

Oleh **Pontjo Sutowo**
Ketua Aliansi Kebangsaan

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini memperlihatkan karakteristik dinamis dan proaktif merespon berbagai dinamika politik dan ekonomi global. Termasuk juga aktif berkontribusi mencari penyelesaian damai atas berbagai konflik kawasan dan konflik antar negara, seperti konflik Rusia-Ukraina dan konflik Palestina.

Indonesia juga aktif mendorong dan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional melalui berbagai forum bilateral dan multilateral. Iktu juga mendorong terwujudnya tata perdagangan internasional dan investasi global yang lebih terbuka dan berkeadilan.

Karakteristik dinamis dan aktif ini sesungguhnya sesuai dengan filosofi, tujuan nasional, doktrin dan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang sudah dirumuskan dan ditetapkan para pendiri bangsa. Dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: *"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan"*. Sedangkan pada alinea selanjutnya ditegaskan bahwa Indonesia *"...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.."*

Prinsip dasar dan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kemudian melahirkan doktrin 'Bebas-Aktif' sebagai prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini. Prinsip ini menegaskan komitmen Indonesia untuk “bebas” dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia, serta “aktif” berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kalau kita dalam secara sungguh-sungguh doktrin “Bebas-Aktif” politik luar negeri kita yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa tersebut, sesungguhnya merupakan refleksi “kerangka pembebasan Indonesia” dari penjajahan untuk “merdeka secara politik dan bathin”. Kemerdekaan politik sudah diperoleh melalui proklamasi 17 Agustus 1945 dan penjajahan fisik memang telah berakhir. Tetapi kemerdekaan batin belum sepenuhnya hidup dalam diri bangsa ini. Proklamasi memutus rantai kekuasaan penjajah, tetapi tidak otomatis memutus rantai mental.

Bersyukur, “mental merdeka” telah menjiwai politik luar negeri “Bebas-Aktif” kita yang perlu terus dijaga namun tetap diaktualisasikan sesuai perkembangan kekinian. Untuk menjalankan doktrin “Bebas-Aktif”, Indonesia sebagai bangsa merdeka membutuhkan harga diri kolektif, kerekatan kolektif kita sebagai sesama anak bangsa, saling bertanggung jawab bagi kebaikan bersama, dan tujuan moral bersama sebagai “modal sosial (*social capital*)” yang sangat berharga. Tanpa modal sosial, kemerdekaan hanya menjadi slogan, bukan energi kolektif.

Walaupun prinsip 'Bebas-Aktif' mengikat setiap pemerintahan di Indonesia, namun dalam perkembangannya seringkali prinsip ideal ini ditafsir atau dimaknai secara berbeda, disesuaikan dengan dinamika obyektif setiap zamannya, yang mengakibatkan prinsip ini sering diimplementasikan secara berbeda, bahkan kadang kala justru menyimpang dari prinsip 'Bebas-Aktif'.

Seperti kita ketahui, pada masa lalu pernah peran Indonesia sangat menonjol dalam panggung politik dunia terutama pada dekade 1950-an hingga medio 1960-an, dengan Presiden Soekarno sebagai 'bintangnya'. Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika tahun 1955 (yang menghasilkan "Dasasila Bandung") dan pembentukan Gerakan Non Blok tahun 1961.

Soekarno juga mencanangkan *Conference of the New*

Emerging Forces (CONEFO) yang menginspirasi dan memotivasi semangat kebangsaan negara-negara bekas jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bahkan pada titik ekstrimnya, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB tahun 1965, dan menolak semua bantuan dari World Bank dan IMF ("*Go to hell with your aid!*", kata Soekarno).

Tentu saja perlu juga dicatat bahwa sejak medio dekade 1960-an, politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Soekarno memperlihatkan kecenderungan mulai menjauh dari prinsip Bebas-Aktif, dan mulai mendekatkan diri kepada blok tertentu.

Peran menonjol Indonesia di panggung internasional maupun kiblat politik 'Bebas-Aktif' berubah signifikan sejak mulainya era Orde Baru tahun 1966. Prioritas utama pembangunan ekonomi yang membutuhkan dukungan investasi besar menyebabkan Indonesia semakin tergantung kepada negara-negara Barat, Bank Dunia, IMF, IGGI, dan lembaga keuangan lainnya.

Demikian juga politik luar negeri Indonesia era Reformasi tampak masih meneruskan pola kebijakan dan kecenderungan pragmatisme pemerintah era sebelumnya. Sikap politik luar negeri yang mengedepankan pencapaian manfaat langsung bagi rakyat Indonesia kerap dipandang sebagai bentuk pragmatisme Indonesia terhadap kepentingan nasional dan pudarnya keterlibatan Indonesia pada isu-isu global.

Semakin dinamis dan aktif

Politik luar negeri Indonesia di bawah Bapak Presiden Prabowo satu tahun terakhir ini sudah memperlihatkan sifatnya yang semakin dinamis dan aktif dalam merespons berbagai dinamika percaturan politik dan ekonomi internasional.

Indonesia aktif dalam berbagai forum kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional (Uni Eropa, G-20, BRICS, Forum Ekonomi Dunia di Davos, dll). Indonesia juga ikut mendorong penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, ikut mencari solusi bagi konflik Palestina melalui formula "*two state solution*".

Dalam perkembangan terkini, Indonesia ikut bergabung dengan *Board of Peace* yang digagas

Presiden Donald Trump. Tetapi bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut telah menimbulkan sikap dan pandangan pro-kontra dalam negeri Indonesia sendiri.

Pada satu sisi, keikutsertaan dalam *Board of Peace* dinilai sebagai langkah kongkrit Indonesia untuk mencari solusi damai bagi Palestina. Tetapi pada sisi lain, keikutsertaan itu membuat Indonesia dinilai semakin terikat dengan agenda kepentingan Amerika dan sekutunya, sehingga dipandang Indonesia justru menjauh dari prinsip 'Bebas-Aktif'.

Sudah barang tentu, perdebatan dalam ruang publik tentang arah kebijakan politik luar negeri Indonesia masih akan terus berlangsung. Hal ini wajar bahkan positif dalam alam demokrasi, di mana masyarakat ikut berpendapat sebagai wujud partisipasi dan tanggungjawabnya sebagai warganegara.

Karena pada akhirnya, pelaksanaan politik luar negeri di samping untuk mewujudkan amanat Konstitusi yaitu "...*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*", politik luar negeri adalah juga sebagai sarana memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sendiri pada tingkat internasional.

Masih konsisten "Bebas Aktif"?

Dengan latar belakang yang saya sampaikan, Aliansi Kebangsaan merasa perlu mengajak masyarakat luas dan khususnya para cendekiawan untuk ikut memberikan kontribusi pemikirannya, membahas bagaimana aktualisasi politik negeri Indonesia Bebas-Aktif di tengah realitas konstelasi geopolitik dan ekonomi global yang dinamis dan terus berubah.

Apakah Indonesia masih konsisten melaksanakan politik luar negeri berlandaskan prinsip 'Bebas-Aktif', ataukah sebaliknya implementasi politik luar negeri 'Bebas-Aktif' mulai mengalami pergeseran disebabkan pertimbangan kepentingan pragmatis jangka pendek?"

Satu hal yang harus kita sadari bersama, bahwa Indonesia memang merdeka sebagai negara, tetapi harus diakui belum merdeka sebagai bangsa. Warisan kolonialisme dalam wujud perbudakan

mental-kejiwaan masih terus hidup dan beroperasi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagian besar elite maupun warga bangsa. Karenanya, pembentukan bangsa Indonesia yang berfikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka menjadi sebuah keniscayaan yang harus terus diperjuangkan. Termasuk tentunya dalam mengaktualisasikan politik luar negeri “Bebas-Aktif” kita yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sebagai kerangka pembebasan Indonesia dari penjajahan.***

(Diedit dari sambutan pada acara FGD “Reaktualisasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif”, di Jakarta, 27 Februari 2026).

“Politik luar negeri pada akhirnya bukan hanya tentang ketertiban dunia, tetapi juga sarana memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat internasional.”



OPINI

Indonesia: Mau Maju atau Terjebak dalam Pragmatisme?

Oleh **Prasetijono Widjojo MJ**

Pengamat Ekonomi

Wakil Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila

Lebih dari dua dekade sejak reformasi, Indonesia memang berhasil bangkit dari krisis 1997-1998 yang sempat menjerumuskan ekonomi ke jurang terdalam: pertumbuhan minus 13,2%, kurs rupiah Rp. 17.000 per USD, pengangguran melonjak, dan kemiskinan meluas. Reformasi kala itu adalah “*big bang*” yang mengguncang hampir semua sektor: ekonomi, keuangan, perbankan, hingga politik.

Krisis yang bermula dengan jatuhnya mata uang Thailand (Baht) terhadap USD ternyata telah menjaral dengan cepat ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. *Contagion effects* terjadi melalui berbagai *transmission channels* seperti, perdagangan (ekspor dan impor), investasi (utamanya *short-term investment*), pinjaman luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, maupun akselerasinya yang semakin dipercepat oleh faktor merosotnya kepercayaan (*confidence level*) masyarakat terhadap perekonomian.

Reformasi yang Pragmatis

Sudah banyak sekali upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil membawa Indonesia masuk kategori negara maju. Bahkan masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah. Indonesia juga masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan/kesenjangan, serta ketidakadilan distributif. Kelompok masyarakat terpendil, pulau terluar, masyarakat pedalaman, dan masyarakat pedesaan semakin jauh tertinggal.

Indonesia masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun memang stabil, namun belum cukup untuk melompat ke kategori negara maju. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan tetap menjadi luka lama yang belum sembuh. Upaya-upaya reformasi ekonomi dan keuangan yang selama ini dilakukan masih terperangkap dalam pola pikir pragmatisme, yang berpikir bahwa praktik-

praktik terbaik di negara lain pasti akan membawa kemajuan bangsa.

Ketimpangan Yang Membandel

Dualisme ekonomi ala J.H. Boeke sampai saat ini masih nyata: kota vs desa, pusat vs pinggiran, modern vs tradisional. Kelompok masyarakat di pulau terluar, pedalaman, dan desa semakin tertinggal. Tanpa transformasi struktural, ketimpangan ini akan terus berulang. Ketimpangan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah masih menjadi masalah dalam pembangunan.

Data terbaru menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-55 dari 139 negara dalam *Global Innovation Index 2025*, hanya peringkat ke-6 di ASEAN; Belanja riset dan pengembangan (R&D) Indonesia masih sekitar 0,3% dari PDB, jauh tertinggal dari Korea Selatan (4,8%) atau Singapura (2,2%); Pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% memang stabil, tetapi tidak cukup untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah alarm keras bahwa kita masih berjalan di tempat.

Pragmatisme: Jalan Pintas Menyesatkan

Selama ini pembangunan sering berpijak pada pragmatisme: meniru best practices negara lain, mengimpor teknologi, berharap pada technology transfer dari investasi asing. Hasilnya? Ketergantungan.

Pengalaman menunjukkan, ketika teknologi akhirnya diserahkan kepada Indonesia, ia sudah usang. Kita seperti mempersiapkan “jenderal perang” untuk perang masa lalu. Dunia sudah bicara tentang kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan bioteknologi, sementara kita masih sibuk mengejar teknologi manufaktur yang sudah ketinggalan. Pragmatisme memang tampak praktis, tetapi ia tidak memberi arah. Bahtera pembangunan nasional kehilangan kompas. Tanpa visi, kita hanya berlayar

mengikuti arus, bukan menuju cita-cita. Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang jelas, bukan sekadar pragmatisme.

1. Inovasi dan R&D sebagai prioritas nasional Belanja riset harus ditingkatkan drastis. Tanpa inovasi, kita hanya akan menjadi pasar bagi teknologi asing.

2. Kerangka Trisakti dan Pasal 13 UUD 1945: berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya. Fondasi ini bukan jargon, melainkan arah strategis untuk keluar dari jebakan ketergantungan.

3. *Penta-helix collaboration*: Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media harus bersinergi. Penguasaan teknologi tidak bisa hanya mengandalkan satu aktor.

4. Transformasi struktural ekonomi: dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berbasis pengetahuan. Dari ketergantungan impor ke produksi inovasi lokal.

Tanpa arah baru, Indonesia akan terus terjebak dalam status "*middle income country*" yang stagnan. Negara-negara lain sudah berlari: Vietnam agresif menarik investasi teknologi, Korea Selatan menjadikan R&D sebagai tulang punggung, Tiongkok melompat dengan inovasi digital. Jika kita hanya pragmatis, kita akan tertinggal semakin jauh.

Pragmatisme mungkin memberi solusi cepat, tetapi ia tidak memberi visi. Bahtera pembangunan nasional tidak boleh kehilangan arah. Kita membutuhkan kompas yang jelas: inovasi, kemandirian, dan cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah Indonesia mau maju, atau terus terjebak dalam pragmatisme? Ingat sejarah, ingat cita-cita bangsa, dan jangan pernah putus asa. Kuasai teknologi untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Pragmatisme seakan-akan menjanjikan, namun dalam kenyataannya bisa menyesatkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. ***

“

Bangsa yang kehilangan visi akan berlayar tanpa kompas: mengikuti arus, bukan menuju cita-cita.



OPINI

Merdeka dari Mental Buruh, Saatnya Indonesia Jadi Bangsa Pengusaha

Oleh **Susetya Herawati**

Pengurus Yayasan Suluh Nuswantara Bakti
Teoritis dan Praktisi Kewirausahaan Kontemporer

Transformasi mental pekerja Indonesia bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan gerakan spiritual, sosial, dan ekologis yang berlandaskan Pancasila. Indonesia tidak akan maju jika rakyatnya hanya puas menjadi buruh. Kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas dari penjajahan, melainkan bebas dari belenggu mentalitas feodal. Saatnya bangsa ini berani melompat: dari mental penerima upah menuju mental pencipta kerja, dari buruh menjadi pengusaha.

Spiritualitas: Hubungan Manusia dengan Tuhan

Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi. Dalam konteks kewirausahaan, iman melahirkan keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi ilahi untuk berkembang. Menjadi pengusaha bukan sekadar mencari untung, tetapi juga ibadah. Usaha yang jujur, disiplin, dan penuh syukur adalah wujud pengabdian kepada Tuhan. Seorang buruh yang berani bermimpi menjadi pengusaha sesungguhnya sedang meneguhkan iman: percaya bahwa Tuhan memberi akal, tenaga, dan kesempatan untuk berkarya. Spiritualitas ini melahirkan etos kerja yang jujur, disiplin, dan penuh syukur. Dengan demikian, pengusaha Indonesia bukan hanya pencari laba, melainkan pelayan masyarakat yang menyalurkan berkah Tuhan melalui karya nyata.

Solidaritas: Hubungan Manusia dengan Sesama

Transformasi buruh menjadi pengusaha tidak boleh melupakan solidaritas. Justru, pengusaha baru membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan ekonomi lokal. Data terbaru menunjukkan, UMKM menyumbang hingga 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 65 juta unit pada 2025, menjadikannya tulang punggung ekonomi bangsa. Inilah bukti bahwa pengusaha kecil dan menengah adalah motor kesejahteraan. Pengusaha masa depan harus

menolak eksploitasi dan monopoli, serta menumbuhkan ekonomi gotong royong: usaha yang berbagi keuntungan, memberdayakan komunitas, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Solidaritas ini juga berarti membangun jaringan antar-pengusaha, koperasi, dan komunitas lokal sehingga keberhasilan satu usaha menjadi keberhasilan bersama.

Ekologi: Hubungan Manusia dengan Alam

Menjadi pengusaha bukan berarti bebas merusak lingkungan. Justru, inovasi kesejahteraan manusia Indonesia harus berbasis pada ekonomi berkelanjutan. Hubungan manusia dengan alam adalah kesadaran bahwa bumi bukan sekadar sumber daya, melainkan rumah bersama. Pengusaha yang lahir dari pembebasan mental buruh harus menjadi pelopor energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan sampah. Dengan begitu, usaha bukan hanya menciptakan keuntungan, tetapi juga menjaga warisan bumi bagi generasi mendatang. Ekonomi hijau bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak agar pembangunan tidak mengorbankan masa depan anak cucu bangsa.



Inovasi Kesejahteraan: Tiga Pilar

Transformasi mental buruh menjadi pengusaha membutuhkan inovasi kesejahteraan yang menyentuh tiga aspek:

- **Ekonomi:** akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan ekosistem digital untuk UMKM.
- **Sosial:** pendidikan karakter, budaya gotong royong, dan jaringan komunitas.
- **Spiritual:** etika bisnis, iman, dan kesadaran bahwa usaha adalah jalan pengabdian.

Seperti dikatakan Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pembina BACenter: "UMKM dan koperasi memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di banyak negara, termasuk Indonesia." Pernyataan ini menegaskan bahwa pengusaha kecil bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari pembangunan ekonomi nasional.

Usulan Kebijakan

Usulan kebijakan untuk mewujudkan transformasi ini perlu dirancang secara komprehensif dan mudah dipahami publik. Reformasi pendidikan kewirausahaan menjadi langkah awal dengan menghadirkan kurikulum di sekolah dan kampus yang menanamkan mentalitas pengusaha sejak dini. Program magang pun sebaiknya tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi juga diarahkan ke UMKM dan koperasi agar mahasiswa lebih dekat dengan realitas ekonomi rakyat. Di sisi lain, pemerintah perlu memperluas akses modal dan teknologi melalui penyediaan kredit mikro berbunga rendah serta penguatan platform digital UMKM agar produk lokal mampu menembus pasar global.

Dalam kerangka ekonomi gotong royong, koperasi perlu direvitalisasi sebagai pusat distribusi dan produksi rakyat, disertai pemberian insentif pajak bagi usaha yang berbagi keuntungan dengan komunitas. Upaya ini juga harus berjalan seiring dengan penerapan ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui regulasi ketat terhadap usaha yang merusak lingkungan serta pemberian subsidi dan insentif bagi pelaku usaha yang mengembangkan energi terbarukan dan pertanian organik. Pada saat yang sama, gerakan nasional pembebasan mental perlu digalakkan melalui kampanye publik untuk mengubah pola pikir masyarakat dari "mencari

kerja" menjadi "menciptakan kerja". Seluruh langkah tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna membangun ekosistem kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai Kompas

Pancasila adalah jalan pembebasan mental. Ia menuntun buruh untuk melihat dirinya bukan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang berdaya.

- Dengan Ketuhanan, buruh menemukan kekuatan spiritual.
- Dengan Kemanusiaan, buruh menemukan solidaritas.
- Dengan Persatuan, buruh menemukan identitas bangsa.
- Dengan Kerakyatan, buruh menemukan suara demokrasi.
- Dengan Keadilan Sosial, buruh menemukan tujuan kesejahteraan.

Indonesia tidak akan maju jika rakyatnya hanya menjadi buruh tanpa keberanian bermimpi. Pembebasan mental adalah kunci: membebaskan rasa takut, membebaskan mentalitas feodal, dan membebaskan ketergantungan. Dengan menjadi pengusaha, buruh Indonesia bukan hanya meningkatkan kesejahteraan dirinya, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi bangsa. Hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam menjadi fondasi moral yang memastikan transformasi ini tidak kehilangan arah.

Dengan Pancasila sebagai kompas, bangsa ini akan melahirkan generasi pengusaha yang beriman, beradab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Inilah jalan menuju Indonesia yang merdeka secara mental, sejahtera secara sosial, dan lestari secara ekologis. Transformasi ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan sejarah: agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi bangsa lain, tetapi menjadi pusat inovasi, produksi, dan peradaban yang membanggakan.***



SELAMAT MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL

Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari terus tumbuh dengan berpikir merdeka, bertindak merdeka, dan bersikap merdeka demi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.



OPINI

Tantangan Transformasi Pancasila dalam Pembangunan Manusia Indonesia Merdeka

Oleh **Didin S. Damanhuri**

Guru Besar Ekonomi-Politik FEM IPB

Pembangunan Manusia Merdeka Indonesia kini tengah terjadi tarik menarik kearah liberalisme, sosialisme demokrat dan heterodox (keluar dari *mainstream* seperti yang dituntut oleh Pancasila). Pertama, pemikiran liberalisme yang memandang manusia sebagai individu otonom yang rasional, (mampu berpikir dan memilih). Seperti kata John Locke dalam bukunya *An Essay concerning Human Understanding* (1689), bahwa manusia sejak lahir memiliki hak hidup, kebebasan dan kepemilikan. Jadi manusia Merdeka Adalah manusia yang bebas menentukan hidupnya sendiri tanpa paksaan pihak luar. Dalam konsep liberalisme, juga mempunyai prasyarat bahwa manusia merdeka haruslah bebas dari campur tangan pihak lain (negara, agama dan lainnya) sehingga negara lebih mengurus hal-hal makro (hubungan internasional, fiscal, moneter dan seterusnya) dan dikenal istilah "*minimum state*". Model utamanya adalah Amerika Serikat.

Sosialisme Demokrat dan Heterodox (keluar dari *mainstream* seperti yang dituntut oleh Pancasila). Pertama, pemikiran Liberalisme yang memandang manusia sebagai individu otonom yang rasional, (mampu berpikir dan memilih). Seperti kata John Locke dalam bukunya *An Essay concerning Human Understanding* (1689), bahwa manusia sejak lahir memiliki hak hidup, kebebasan dan kepemilikan. Jadi manusia Merdeka Adalah manusia yang bebas menentukan hidupnya sendiri tanpa paksaan pihak luar. Dalam konsep liberalisme, juga mempunyai prasyarat bahwa manusia merdeka haruslah bebas dari campur tangan pihak lain (negara, agama dan lainnya) sehingga negara lebih mengurus hal-hal makro (hubungan internasional, fiscal, moneter dan seterusnya) dan dikenal istilah "*minimum state*". Model utamanya adalah Amerika Serikat.

Kedua, pemikiran Sosialisme-Demokrat, dengan pemikir besarnya Jean-Jacques Rousseau (Filsuf Prancis) dalam bukunya *Discourse on The Origin of*

Inequality (1755). Sebenarnya Pemikiran Sosdem merupakan kritik terhadap pemikiran liberalisme. Artinya dalam melihat buruknya ketimpangan akibat dampak liberalisme-kapitalis, memilih jalan evolusioner dengan mentransformasikan konsepnya pasca memenangkan pemilu. Konsepnya antara lain, menyatakan manusia dilahirkan merdeka, tetapi di mana-mana terbelenggu. Jadi manusia merdeka adalah manusia yang tidak tunduk kepada manusia lain, tapi tunduk kepada kehendak umum (*general will*). Kebebasan bukanlah semaunya, tapi kebebasan ikut dalam menentukan aturan bersama secara egaliter. Dengan demikian, kebebasan adalah kebebasan kolektif, tidak boleh dikuasai oleh elite, tidak boleh ada dikatatur mayoritas sehingga tercapai keadilan bersama. Namun basis nilainya sama dengan liberalisme, yakni sekularisme. Model utamanya adalah negara-negara Scadinavia.

Ketiga, pemikiran heterodox yang berbeda dengan liberalisme maupun sosdem. Yakni negara, korporasi dan masyarakat tidak saling berlawanan. Manusia merdeka tidak dilihat sebagai individu lepas, tapi bagian dari korporasi atau komunitas atau bangsa. Kapitalisme tidak dibiarkan bebas, tapi diarahkan, dilindungi sekaligus dibatasi yang hasilnya supaya tidak muncul oligarki. Sementara, manusia merdeka dibatasi secara moral dan budaya serta agama. Model empiris utamanya adalah Jepang. Konsep Pancasila secara praktek dekat dengan dengan model heterodox.

Post Colonial Society sebagai Jebakan

Transformasi manusia merdeka Indonesia hingga kini, menghadapi jebakan "Masyarakat Pasca Kolonial" (*Post Colonial Society*). Antara lain mengacu kepada karya Samir Amin: *Accumulation on a World Scale* (1970). Juga karya Edward Said: *Orientalism* (1978). Masyarakat Pasca Kolonial (MPK) adalah masyarakat yang secara formal sudah merdeka dari penjajahan, namun struktur kekuasaan

kekuasaan, ekonomi, politik, budaya dan mentalitasnya masih dipengaruhi oleh warisan kolonial.

Misalnya dalam konteks Indonesia: struktur ekonominya masih didominasi oleh ekspor bahan mentah (sawit, batubara, nikel) dan mengimpor barang-barang industri. Sementara struktur dan mentalitas elitnya cenderung masih merupakan reproduksi dari kelas kolonial lama (bias barat dan memandang asing lebih superior). Kemudian juga birokrasi dan sistem hukumnya banyak berasal dari warisan Belanda dengan segala kosekuensinya ke dalam penegakan hukum, pandangan inferior kepada bumiputera dan kaum miskin serta memandang superior kepada pihak asing dan orang-orang kaya.

Dampaknya dalam rangka pengisian kemerdekaan dan Pembangunan serta hasil-hasilnya, Indonesia setelah 80 tahun Merdeka, tetap saja sebagai Negara Berkembang dimana kebutuhan pokok, finansial, teknologi hingga pemikiran dan kebijakan Pembangunan masih tergantung kepada Negara-Negara Industri Maju, terutama Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Belakangan ada gejala di Era Pemerintahan Jokowi yang lebih bergantung kepada China.

Lebih jauh, dalam struktur MPK, banyak elitnya lebih berorientasi kepada kepentingan Negara-Negara Industri Maju (menjadi proxi atau broker asing). Bahkan terjadi kontradiksi antara jargon dan kampanye politik dengan perilaku dan aksi-aksi kebijakannya. Di satu pihak banyak dinarasikan tentang kepentingan rakyat, wong cilik, cara berpakaian dan tampilan yang merakyat, gimmick kerakyatan, ekonomi untuk rakyat, pembangunan dari pinggiran/pedesaan dan seterusnya. Namun dalam arti kongkretnya, semua itu menjadi bullshit. Hal itu karena misalnya banyak dibangun ekonomi dan infrastruktur besar-besaran (woosh, IKN, bandara dan pelabuhan internasional, penghiliran nikel, jalan tol, *food estate*, koperasi desa, MBG dan seterusnya). Namun hasilnya yang memperoleh terbesar manfaatnya adalah pihak asing atau elite dan korporasi domestik yang terkait kekuasaan.

Dalam dunia ilmu pengetahuan pun, kurikulumnya sedemikian rupa berbasis epistemik dan asumsi-asumsi akan hegemoniknya pihak asing (barat). Misalnya dalam ilmu ekonomi, dikenal *Investment Grade* yang menunjukkan paling layak investasi

adalah kalau kalangan korporasi asing dan perusahaan-perusahaan konglomerat domestik yang menyatakan minat dengan melihat indikator-indikator makro (pertumbuhan, APBN, perbankan, inflasi, kurs, regulasi dan seterusnya) yang kondusif terhadap keberadaan mereka. Gak pernah diperhitungkan kondisi-kondisi yang *favorable* bagi UMKM. Padahal dalam struktur dunia usaha, yang sangat dominan (99%) adalah UMKM. Kemudian, dalam teori ekonomi arus tengah, pasar dan sektor swasta selalu lebih diunggulkan daripada aktor negara. Juga menganggap bahwa pertumbuhan dan pasar akan mampu menyelesaikan kemiskinan dan ketimpangan. Jadi dalam ilmu-ilmu sosial masih besar sekali *western* bias bahkan *eurocentrism* dan terakhir American-Neo-liberalism Oriented.

Keluar dari Jebakan MPK menuju jadi Bangsa yang Unggul

Padahal dewasa ini, negara-negara yang berhasil *mentrespases* kemajuan ekonomi Amerika, seperti Jepang justru karena "keunikan" dan menyempal (heterodox) baik dalam makro ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jepang dalam transaksi aktor-aktor ekonominya lebih menekankan kemitraan (*subcontracting system*) daripada perdagangan bebas. Juga secara sosial-budaya, Jepang lebih merevitalisasi nilai-nilai tradisi dan agamanya daripada mengganti dengan sekularisme seperti di negara Barat. Begitu juga dalam relasi politik, Jepang lebih memilih consensus scenario based of the democracy daripada individual freedom scenario based of the democracy.

Sementara Malaysia yang relative lebih berhasil dibandingkan Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik serta budaya, juga karena "tidak terlalu terbaratkan". Malaysia stabil politiknya dengan tetap ada pemilu untuk memilih Perdana Menteri dan DPRnya. Namun keberadaaan Yang Dipertuan Agung (YDA) dengan 9 kesultanan sebagai Kepala Negara Kolektif sehingga dalam keadaan krisis atau kondisi tertentu akhirnya YDA yang menjadi penentu solusinya. Sementara, Agama Islam dan tradisi Melayu dari masyarakat Malaysia, telah menjadi factor kohesif dalam membangun peradabannya.

Indonesia, dalam tranformasi dan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Merdeka, hendaknya seluruh effort dengan terbangunnya manusia dan masyarakat Pancasila sebagai prasyarat menjadi Bangsa yang Unggul di dunia. Semoga... ***

OPINI

Koperasi Kuantum sebagai Institusi Pemerdakaan Ekonomi Indonesia

Oleh **Agus Pakpahan**

Rektor Universitas Koperasi Indonesia

"Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Kalimat pembuka Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan sekadar proklamasi politik. Ia adalah pernyataan filosofis yang mendalam tentang hakikat kemanusiaan dan tujuan berbangsa. Lebih dari delapan dekade setelah kata-kata itu diucapkan, Indonesia telah merdeka secara politik. Namun, sebagaimana diingatkan dalam Manifesto Manusia Indonesia Merdeka (2026), "Kemerdekaan politik sudah diperoleh dan penjajahan fisik memang telah berakhir. Tetapi kemerdekaan batin belum sepenuhnya hidup dalam diri rakyatnya." Warisan paling berbahaya dari kolonialisme—perbudakan mental-kejiwaan—ternyata terus hidup dan beroperasi dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagian besar elite maupun warga bangsa.

Di sinilah letak ironi terdalam republik ini: Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, setelah 80 tahun, amanat konstitusional ini belum terwujud. Mengapa? Karena kita membaca Pasal 33 dengan kacamata pinjaman—kacamata ekonomi neoklasik yang mekanistik, reduksionis, dan buta terhadap dimensi-dimensi non-material yang justru menjadi inti dari asas kekeluargaan itu sendiri.

Esai ini hendak menunjukkan bahwa Koperasi Kuantum—sebuah paradigma baru yang lahir dari pengalaman empiris Koperasi Kredit Keling Kumang (KKKK) di pedalaman Kalimantan Barat—adalah jalan keluar dari kebuntuan paradigmatik ini. Lebih dari itu, Koperasi Kuantum adalah institusi pemerdakaan

dalam makna yang paling autentik: ia membebaskan manusia Indonesia dari belenggu mental kolonial, memulihkan kapabilitasnya sebagai subjek yang berdaulat, dan membuka jalan menuju lompatan peradaban yang diimpikan para pendiri bangsa.

Kemerdekaan sebagai Kapabilitas: Perspektif Amartya Sen

Untuk memahami mengapa Koperasi Kuantum adalah institusi pemerdakaan, kita perlu meminjam lensa dari Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang merumuskan pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*). Bagi Sen, kemiskinan bukan sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan ketiadaan kapabilitas (*capability deprivation*)—ketidakmampuan orang untuk melakukan dan menjadi apa yang mereka hargai (*what people can do or can be*). Pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas manusia: kemampuan untuk hidup sehat, mengenyam pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan memiliki suara dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Dalam kerangka ini, kolonialisme mental yang didiagnosis oleh Manifesto Manusia Merdeka adalah bentuk paling parah dari deprivasi kapabilitas. Mental kaum terjajah—kurang percaya diri, rasa rendah diri kolektif, lemah pendirian, dan miskin kemandirian—adalah kondisi di mana manusia kehilangan agensinya (*agency*). Ia menjadi objek pembangunan, bukan subjek. Ia "mengikuti," bukan "menentukan." Ia adalah *homo economicus* yang pasif, bukan *homo connectus* yang berdaulat.

Di sinilah Koperasi Kuantum menemukan relevansinya yang paling mendalam. Ia bukan sekadar model bisnis alternatif. Ia adalah institusi yang secara fundamental memulihkan dan memperluas kapabilitas manusia Indonesia.

Keling Kumang: Lompatan Kuantum sebagai

Bukti Pemerdekaan

Pada 25 Maret 1993, di sebuah dusun terpencil bernama Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dua belas orang petani dan buruh harian berkumpul dalam ruangan 4x4 meter. Mereka meletakkan uang hasil jerih payah di atas meja kayu sederhana—Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000—hingga terkumpul Rp 291.000. Seperti dikenang Ibu Maria, salah satu pendiri, "Rasanya seperti miliaran. Itu bukan sekadar uang. Itu adalah kepercayaan yang kami letakkan di atas meja."

Tiga puluh tiga tahun kemudian, tanpa dukungan dana dari pemerintah, tanpa pinjaman perbankan, entitas yang sama telah bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi rakyat yang mencengangkan: 232.200 anggota, aset Rp 2,3 triliun, 79 kantor yang tersebar di 13 kabupaten/kota, serta 736 staf. Dari rahimnya lahir berbagai *spin-out*: Institut Teknologi Keling Kumang, SMK Keling Kumang, Ladja Hotel, Keling Kumang Mart, Koperasi Produsen Agrotani, Agrowisata Kelay, Taman Kelempiau—sebuah konglomerasi koperasi yang melayani anggotanya dari lahir hingga lanjut usia.

Apa yang terjadi di KKKK bukanlah pertumbuhan linear. Ia adalah lompatan kuantum. Parameter Theta (θ)—yang mengukur rasio antara anggota dalam kondisi lompatan terhadap kondisi awal—melonjak dari 0,058 pada tahun 1993 menjadi 9,55 pada tahun 2025, peningkatan 164 kali lipat. Ini adalah *phase transition*: perubahan kualitatif dalam struktur probabilitas itu sendiri. Kemiskinan, yang tadinya merupakan keadaan paling mungkin (95% probabilitas), kini hanya 10%. Sebaliknya, kesejahteraan menjadi keadaan dominan (90% probabilitas).

Dalam bahasa Amartya Sen, inilah perluasan kapabilitas yang radikal. Anggota KKKK yang dulunya terjerat rentenir, tidak memiliki tabungan, dan tidak mampu menyekolahkan anak—kini memiliki akses ke kredit produktif, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan yang terpenting: suara dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak lagi "mengikuti," tetapi "menentukan." Mereka telah bertransformasi dari objek pembangunan menjadi subjek yang berdaulat.

Paradigma Kuantum: Membaca Pasal 33 dengan Lensa yang Tepat

Mengapa model ekonomi konvensional gagal menjelaskan fenomena KKKK—dan dengan demikian gagal mewujudkan amanat Pasal 33? Jawabannya terletak pada paradigma yang digunakan. Ekonomi neoklasik, yang diwarisi dari fisika Newtonian, bersifat mekanistik, reduksionis, dan deterministik. Ia memisahkan ekonomi dari sosial, materi dari spiritual, individu dari kolektif. Ia hanya mengakui modal finansial dan fisik sebagai input produksi, dan buta terhadap modal sosial, kultural, dan spiritual.

Koperasi Kuantum menawarkan paradigma alternatif yang terinspirasi dari fisika kuantum. Lima pilarnya—Medan Kesadaran, Keterjeratan Kuantum, Superposisi, Efek Pengamat, dan Keutuhan—memberikan bahasa untuk memahami dimensi-dimensi yang selama ini luput dari analisis konvensional:

1. Medan Kesadaran ($\lambda = 0,85$ di KKKK) menegaskan bahwa nilai-nilai bersama—seperti handep (gotong royong) dan hidop barentin (hidup beraturan) dalam budaya Dayak—bukan sekadar etika bisnis, melainkan realitas non-material yang membentuk sistem dari dalam. Inilah fondasi yang tidak pernah dimiliki oleh Koperasi Unit Desa (KUD) yang dibangun secara top-down.
2. Keterjeratan Kuantum ($\chi = 0,82$) menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekadar mekanisme pengurangan risiko, melainkan energi primordial yang menghubungkan anggota secara non-lokal. Ketika satu anggota sukses karena pinjaman KKKK, kepercayaan anggota lain ikut bertambah, seolah-olah ada korelasi instan yang tidak dapat dijelaskan oleh mekanisme pasar biasa.
3. Superposisi ($|\alpha|^2:|\beta|^2 = 45:55$) membuktikan bahwa kepentingan individu dan kolektif tidak harus dipertentangkan. Dalam KKKK, anggota adalah pemilik, nasabah, pengawas, dan saudara sekaligus—semua peran hadir simultan dalam harmoni dinamis.
4. Efek Pengamat ($\eta = 0,73$) menegaskan bahwa cara pemimpin "mengamati" anggota—dengan penuh kepercayaan dan empati, bukan kecurigaan dan kontrol—secara aktif membentuk realitas organisasi. Kepemimpinan pelayan (servant leadership) adalah kunci.
5. Keutuhan ($R = 4,7$) mengingatkan bahwa koperasi adalah sistem hidup yang tak tereduksi. Ketangguhannya dalam krisis—terbukti saat pandemi 2020 di mana simpanan hanya turun 3% lalu naik 8%—muncul dari integrasi semua dimensi,

bukan dari optimalisasi satu bagian saja.

Dengan lensa kuantum ini, Pasal 33 UUD 1945 akhirnya dapat dibaca dalam cahaya yang tepat. "Usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" bukanlah sekadar etika bisnis, melainkan Medan Kesadaran yang menjadi fondasi realitas ekonomi. "Bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" berarti pengelolaan kolektif, demokratis, dan berkelanjutan melalui koperasi sebagai perwujudan prinsip Keutuhan yang mengintegrasikan ekonomi, ekologi, dan sosial.

Indonesia 2045: Lompatan Kuantum Menuju Peradaban Baru

Apa yang terjadi jika paradigma Koperasi Kuantum tidak hanya hidup di pedalaman Kalimantan, tetapi menjadi arus utama pembangunan ekonomi Indonesia? Apa yang terjadi jika ribuan KKKK lain lahir di seluruh pelosok Nusantara—dari Aceh hingga Papua, dari Minangkabau hingga Toraja—masing-masing berakar pada kearifan lokalnya sendiri, tetapi terhubung dalam jaringan keterjeratan nasional?

Bayangkan Indonesia pada tahun 2045, tepat seratus tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Ini bukan sekadar mimpi. Data KKKK menunjukkan bahwa Compounded Annual Growth Rate (CAGR) aset mencapai 58,2% per tahun—sebuah angka yang melampaui logika bisnis konvensional mana pun. Jika pertumbuhan semacam ini dapat direplikasi di ratusan koperasi di seluruh Indonesia, kita tidak sedang membicarakan pertumbuhan inkremental. Kita sedang membicarakan lompatan kuantum peradaban.

Dalam Indonesia 2045 yang digerakkan oleh Koperasi Kuantum:

Pertama, kemiskinan akan menjadi anomali statistik. Parameter Theta KKKK yang melonjak dari 0,058 menjadi 9,55 menunjukkan bahwa phase transition dari kemiskinan menuju kesejahteraan bukanlah utopia. Jika ini direplikasi secara nasional, probabilitas seorang warga Indonesia untuk hidup dalam kemiskinan akan turun drastis di bawah 10%—bukan karena bantuan sosial, tetapi karena kapabilitasnya telah diperluas secara fundamental.

Kedua, desa akan menjadi pusat gravitasi ekonomi, bukan pinggiran. Dengan 79 kantor KKKK yang

tersebar di 13 kabupaten/kota dan melayani 232.200 anggota, kita melihat bahwa infrastruktur ekonomi tidak harus tersentralisasi di kota-kota besar. Desentralisasi radikal ala Koperasi Kuantum—dengan otonomi luas pada kelompok-kelompok lokal ($\alpha = 0,66$)—memungkinkan setiap desa menjadi simpul ekonomi yang hidup. Dana desa tidak lagi sekadar proyek fisik jangka pendek, tetapi modal awal untuk membangun Medan Kesadaran dan Keterjeratan Kuantum di tingkat akar rumput.

Ketiga, Indonesia akan keluar dari perangkap negara pinggiran (periphery trap). Selama berabad-abad, kita menjadi raja rempah, raja sawit, tetapi tetap menjadi pesuruh dalam tatanan ekonomi global. Koperasi Kuantum, dengan spin-out seperti ITKK, hotel, dan pusat agrowisata, menunjukkan jalan untuk menguasai seluruh rantai nilai—dari produksi bahan baku hingga pemasaran produk akhir. Dalam Gelombang Kondratieff Keenam yang didorong oleh bioekonomi dan ekonomi hijau, Indonesia dengan kekayaan biocultural diversity-nya memiliki modal lompatan yang tidak dimiliki oleh bangsa mana pun. Koperasi Kuantum adalah kendaraan yang tepat untuk mengelola kekayaan itu secara kolektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Keempat, manusia Indonesia akan sungguh-sungguh merdeka. Manifesto Manusia Merdeka mendiagnosis bahwa "mental kaum terjajah masih bercokol kuat" dalam diri kita. Koperasi Kuantum adalah institusi yang secara fundamental menyembuhkan penyakit mental ini. Ketika seorang petani di Dusun Batu Mata dapat meminjam uang tanpa agunan, menyekolahkan anaknya, dan memiliki suara dalam rapat anggota—ia tidak lagi merasa rendah diri. Ia memiliki agency. Ia adalah subjek yang berdaulat. Inilah makna terdalam dari kemerdekaan: bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi bebas dari perbudakan mental yang membuat kita merasa tidak mampu menentukan nasib sendiri.

Kelima, keberlanjutan generasional akan terjamin. Parameter Omega KKKK yang mencapai 0,85 menunjukkan bahwa regenerasi kepemimpinan, transmisi pengetahuan, dan pewarisan nilai telah terlembagakan dengan baik. Koperasi ini tidak akan mati ketika para pendirinya tiada. Dalam Indonesia 2045, kita tidak akan lagi menyaksikan tragedi KUD yang runtuh ketika subsidi dicabut atau ketika tokoh kuncinya pensiun. Setiap koperasi adalah sistem

hidup yang mampu beregenerasi, menumbuhkan tunas-tunas baru, dan memastikan bahwa api semangat terus menyala melintasi generasi.

Jalan Menuju 2045: Agenda Strategis

Mewujudkan visi Indonesia 2045 yang digerakkan oleh Koperasi Kuantum bukanlah pekerjaan satu malam. Ia membutuhkan transformasi fundamental di berbagai lini.

Pertama, dekolonisasi paradigma. Kita harus berhenti membaca realitas ekonomi Indonesia dengan kaca mata pinjaman. Ilmu ekonomi yang diajarkan di kampus-kampus harus berani mengintegrasikan dimensi-dimensi yang selama ini dipinggirkan: nilai, kepercayaan, solidaritas, spiritualitas. Rumpun ilmu koperasi yang mandiri—dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang khas—harus segera dibangun. Ini artinya secara epistemologis diperlukan perubahan paradigma yaitu dari paradigma Newtonian ke paradigma Kuantum.

Program Litbang Koperasi Kuantum Nusantara yang digagas dalam buku ini adalah langkah awal yang strategis.

Kedua, revolusi kebijakan. Pemerintah harus beralih dari controller menjadi enabler. Regulasi harus memberi ruang bagi keberagaman model koperasi, tidak memaksakan cetak biru yang seragam. Insentif fiskal harus diberikan kepada koperasi yang menunjukkan tata kelola partisipatif, transparansi radikal, dan dampak sosial yang terukur. Pendidikan koperasi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional—bukan sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi sebagai paradigma dasar tentang bagaimana ekonomi yang manusiawi bekerja. Koperasi diangkat statusnya menjadi rumpun keilmuan mandiri. Tanpa ini kondisi pendidikan koperasi sama dengan pendidikan di Fakultas Kedokteran tetapi tidak menghasilkan dokter.

Ketiga, gerakan sosial. Koperasi Kuantum tidak bisa diinstruksikan dari Jakarta. Ia harus lahir dari kesadaran kolektif masyarakat di akar rumput. Diperlukan ribuan fasilitator yang rendah hati—yang bisa "duduk di antara anggota" seperti yang berlaku di KKKK—untuk mendampingi komunitas-komunitas lokal menggali kembali kearifan budayanya dan

membangun Medan Kesadaran bersama. Gerakan ini harus bersifat organik, bukan proyek.

Keempat, aliansi strategis. Koperasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan ekosistem yang mendukung: universitas yang melakukan riset aksi partisipatoris, media yang menyebarkan narasi-narasi inspiratif, lembaga keuangan yang menyediakan modal dengan syarat yang adil, dan pemerintah daerah yang menciptakan iklim usaha yang kondusif. Aliansi Kebangsaan, dengan Manifesto Manusia Merdeka-nya, dapat menjadi katalisator untuk membangun ekosistem ini.

Kembali ke Fitrah Cita Negara

Manifesto Manusia Indonesia Merdeka mengingatkan kita bahwa "Proklamasi adalah peristiwa politik, tetapi manusia merdeka adalah proses peradaban." Proklamasi memutus rantai kekuasaan, tetapi tidak otomatis memutus rantai mental. Ternyata kemerdekaan politik tidak otomatis melahirkan manusia merdeka.

Di sinilah letak makna terdalam dari Koperasi Kuantum. Ia bukan sekadar model bisnis. Ia adalah institusi pemerdekaan dalam arti yang paling fundamental: ia memulihkan kapabilitas manusia Indonesia untuk berpikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka. Ia membebaskan kita dari belenggu mental kolonial—mental peniru dan pembebek, mental pecundang dan totalitarian—yang telah lama memasung potensi kita sebagai bangsa.

KKKK telah membuktikan bahwa lompatan kuantum itu mungkin. Dari ruang 4×4 meter di Tapang Sambas, dari modal Rp 291.000, dari 12 orang yang percaya—lahirlah ekosistem ekonomi yang mengelola Rp 2,3 triliun dan melayani 232.200 anggota. Ini bukan dongeng. Ini adalah data. Ini adalah bukti bahwa ketika manusia Indonesia berani berpikir dengan paradigmanya sendiri, berakar pada nilai-nilai budayanya sendiri, dan bertindak dengan keberanian moral yang lahir dari kesadaran kolektif—maka kemerdekaan sejati, kemerdekaan lahir dan batin, bukanlah utopia.

Saatnya para cendekiawan bicara. Saatnya seluruh anak bangsa berhenti menjadi peniru, pecundang, atau penonton. Saatnya berpikir, bersikap, dan bertindak MERDEKA.

Dari Tapang Sambas untuk Indonesia. Dari Keling Kumang untuk Nusantara. Lompatan kuantum peradaban ada di depan mata. Mari kita raih bersama.

Cooperative minds are quantum minds. Dan dengan pikiran kuantum itu, kita akan membangun peradaban baru yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat—sebuah Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. ***



Koperasi Kuantum menawarkan paradigma alternatif yang terinspirasi dari fisika kuantum. Lima pilarnya: Medan Kesadaran, Keterjeratan Kuantum, Superposisi, Efek Pengamat, dan Keutuhan.



OPINI

Merdeka yang Belum Selesai, Paradoks Manifesto Manusia Indonesia

Oleh **D. Bagiono**

Yayasan Suluh Nuswantara Bakti

Manifesto Manusia Indonesia Merdeka saya maknai sebagai undangan berpikir, bukan perintah untuk tunduk; sebagai titik berangkat kesadaran, bukan garis akhir kebenaran. Karena itu, izinkan saya menanggapi dengan satu kegelisahan: lebih dari delapan puluh tahun kita menyangdang status negara merdeka, tetapi benarkah kita telah merdeka sebagai bangsa?

Di sinilah paradoks itu berdiri. Proklamasi telah memutus rantai kekuasaan fisik, namun tidak sertamerta memutus rantai mental terjajah dalam batin rakyatnya. Manifesto itu menyebut bahwa selepas 1945 kita mewarisi sistem pendidikan kolonial yang menekankan hafalan, membentuk pegawai, bukan warga negara; mengajarkan kepatuhan, bukan keberanian moral. Kalimat ini menggugah sekaligus menantang.

Sejarah menunjukkan, para pendiri bangsa seperti, Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, Sam Ratulangi, dan Arnold Mononutu adalah pribadi-pribadi bernalar tajam dan berani secara moral. Namun mereka lebih merupakan pengecualian daripada produk massal sistem. Banyak pejuang bahkan berangkat dari Sekolah Ongko Loro yang sederhana. Artinya, nalar merdeka bukan terutama soal fasilitas, melainkan keberanian batin untuk menjadi subjek moral.

Pertanyaannya, mengapa api itu tidak menyala merata? Mengapa api itu belum menyebar sepenuhnya? Mengapa opini, gelar, dan legitimasi dari luar negeri sering kita anggap lebih sahih dibanding pandangan para ahli bangsa sendiri? Ada tiga akar persoalan yang perlu kita hadapi. Pertama, feodalisme yang diinstitusikan sebagai alat kontrol, melahirkan budaya patronase dan ketergantungan. Kedua, keputusan akar sejarah yang menumbuhkan rasa rendah diri kolektif.

Ketiga, normalisasi ketimpangan yang membuat penindasan terasa sebagai nasib, sehingga imajinasi tentang masa depan yang berdaulat melemah.

Karena itu, kemerdekaan hari ini harus dimaknai sebagai kerja batin, sekaligus kerja sosial. Merdeka berpikir bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan keberanian menguji informasi dengan nalar sendiri, seraya sadar bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Manusia merdeka adalah manusia beradab dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan rakyat menjadi kunci. Ia tidak lahir dari penunjukan administratif, melainkan dari keberanian warga di akar rumput mengambil tanggung jawab tanpa mencederai hak sesama. Ia berawal dari keteladanan: bernalar kritis, berani bertanya, memahami sejarah bangsa dari perspektifnya sendiri, jujur berpendapat, berpihak pada produk bangsa, dan komitmen pada verifikasi informasi. Ia tumbuh melalui ruang-ruang belajar merdeka di komunitas, diskusi yang mengasah nalar, serta upaya menyambung kembali jejak perjuangan bangsa agar generasi muda memiliki harga diri kolektif.

Jika cita-cita Indonesia Emas 2045 ingin bermakna, ia harus melahirkan generasi petarung yang bertanggung jawab, bukan sekadar capaian administratif. Kemerdekaan yang tidak dipraktekkan setiap hari akan kembali menjadi slogan. Maka inilah saatnya berpikir, bersikap, dan bertindak merdeka—lahir dan batin.***

OPINI

Berkeadilan Inti Bernegara

Oleh **Ahmad Zacky Siradj**
Sekjen Aliansi Kebangsaan

Negara sebagai organisasi yang paling besar pada tingkat suatu bangsa merupakan organisasi yang paling besar pada tingkat suatu bangsa merupakan organisasi yang dikehendaki oleh warganya sendiri atau oleh rakyat sendiri. Karena kehadiran negara tersebut merupakan perwujudan kebutuhan rakyatnya untuk hidup teratur dan dapat mencapai tujuan bersama. Maka dengan sendirinya negara hendaknya dapat menjamin keberlangsungan hidup dan kehidupan rakyatnya. Salah satu nilai yang dapat menjamin keberlangsungan hidup itu adalah keadilan.

Itu berarti bahwa baik bagi kelangsungan hidup suatu negara maupun kelangsungan kehidupan rakyatnya maka terwujudnya hidup yang berkeadilan menjadi sangat strategis. Atau menjadi inti dari kehidupan itu sendiri. Sebab boleh jadi negara itu bisa runtuh atau bubar, dikarenakan keadilan tidak terwujud. Begitu pula rakyat akan jauh dari kehidupannya yang sejahtera bila persoalan keadilan ini terabaikan.

Pantas bila kemudian suatu negara memiliki komitmen penuh pada keadilan ini. Indonesia misalnya, sebagai negara yang merdeka bila dilihat dari bunyi pembukaan konstitusinya mempunyai komitmen keadilan yang begitu kuat disebut hingga beberapa kali kata atau ungkapan keadilan ini. Di awal dalam pembukaan itu disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian ada kalimat yang berbunyi ; “...mengantarkan rakyat Indonesia mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Ungkapan keadilan atau kata adil itu pun menjadi komitmen negara ini dalam ikut memberi arti penting dalam percaturan hubungan dengan negara-negara lain.

Sebagaimana dikemukakan...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial... Ketiga, normalisasi ketimpangan yang membuat penindasan terasa sebagai nasib, sehingga imajinasi tentang masa depan yang berdaulat melemah.

Karena itu, kemerdekaan hari ini harus dimaknai sebagai kerja batin, sekaligus kerja sosial. Merdeka berpikir bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan keberanian menguji informasi dengan nalar sendiri, seraya sadar bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Manusia merdeka adalah manusia beradab dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan rakyat menjadi kunci. Ia tidak lahir dari penunjukan administratif, melainkan dari keberanian warga di akar rumput mengambil tanggung jawab tanpa mencederai hak sesama. Ia berawal dari keteladanan: bernalar kritis, berani bertanya, memahami sejarah bangsa dari perspektifnya sendiri, jujur berpendapat, berpihak pada produk bangsa, dan komitmen pada verifikasi informasi. Ia tumbuh melalui ruang-ruang belajar merdeka di komunitas, diskusi yang mengasah nalar, serta upaya menyambung kembali jejak perjuangan bangsa agar generasi muda memiliki harga diri kolektif.

Jika cita-cita Indonesia Emas 2045 ingin bermakna, ia harus melahirkan generasi petarung yang bertanggung jawab, bukan sekadar capaian administratif. Kemerdekaan yang tidak dipraktekkan setiap hari akan kembali menjadi slogan. Maka inilah saatnya berpikir, bersikap, dan bertindak merdeka—lahir dan batin.***

Follow Us on Social Media



Let's Get Connected for Our Latest News & Updates

 **YouTube** on YouTube Forum Kebangsaan

 **f** on Facebook Jaring Cendekia

 on Website www.aliansikebangsaan.org

 on Instagram Aliansi_Kebangsaan

OPINI

Experience Story sebagai Penerima Bantuan Dana Penelitian Yayasan Dana Darma Pancasila

Oleh **Ade Husna**

Awardee Dana Darma Pancasila Batch 3

Hallo, nama saya Ade Husna, saat ini saya sedang menjalani studi doktoral di Fakultas Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Disertasi saya mengkaji tentang bagaimana moderasi beragama dan toleransi bisa diinternalisasikan di masyarakat yang cenderung konservatif dengan medalami perspektif guru pendidikan agama di provinsi Banten. Saya menggali pengalaman para guru Pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan sekolah, mulai dari tantangannya, strateginya, hingga bagaimana para garda terdepan di dunia pendidikan ini menyuarkan harapan terhadap moderasi beragama di masa depan demi kesatuan dan keutuhan Indonesia.

Menjadi salah satu penerima program Dana Darma Pancasila merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan akademik saya. Program ini bukan hanya memberikan dukungan finansial untuk pengembangan riset, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, kolaborasi, dan penguatan komitmen kebangsaan bagi para mahasiswa Indonesia. Di tengah kompetisi yang sangat ketat dan seleksi yang melibatkan peserta dari berbagai perguruan tinggi di seluruh nusantara, kesempatan untuk terpilih menjadi awardee adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

Saya memutuskan untuk bergabung dengan program Dana Darma Pancasila karena saya melihat adanya kesesuaian antara visi program dengan fokus penelitian yang saya tekuni. Saya percaya bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keberagaman dan persatuan bangsa. Selain itu, program ini tidak sekadar memberikan bantuan dana penelitian, tetapi juga membangun jejaring intelektual antarmahasiswa dan para ahli dari berbagai disiplin

ilmu. Melalui program ini, saya dapat bertemu dengan individu-individu inspiratif yang memiliki semangat kontribusi yang tinggi terhadap Indonesia. Diskusi, pertukaran gagasan, dan pengalaman bersama sesama *awardee* menjadi salah satu pengalaman yang sangat memperkaya perspektif saya sebagai akademisi muda. Lebih dari itu, saya juga sangat senang bisa mendengar pemaparan demi pemaparan dari para tokoh di berbagai acara Dana Darma Pancasila, baik itu daring atau pun luring. Ibarat gelas kosong yang belum berisi, kepala saya seperti selalu siap mendapatkan tuangan air-air segar dari para tokoh Dana Darma Pancasila, agar kelak bisa hidup lebih bermakna seperti mereka. Kobaran semangat berkontribusi nyata pun selalu terasa jika sudah berdiskusi dengan para tokoh di Dana Darma Pancasila.

Manfaat yang saya rasakan setelah menerima program ini sangat besar, baik secara akademik maupun personal. Dari sisi akademik, dukungan dana membantu proses pengembangan penelitian saya sehingga dapat dilakukan dengan lebih optimal. Saya menjadi lebih percaya diri untuk mengembangkan ide-ide penelitian yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan karena keterbatasan sumber daya. Program ini juga meningkatkan motivasi saya untuk menghasilkan penelitian yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata.

Dari sisi personal, pengalaman menjadi awardee Dana Darma Pancasila memberikan pelajaran tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, dan semangat kolaborasi. Saya belajar bahwa penelitian bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik, tetapi juga tentang menghadirkan solusi dan kontribusi untuk masyarakat. Program ini juga memperkuat rasa optimisme saya bahwa generasi

muda Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Bagi teman-teman yang ingin mengikuti program Dana Darma Pancasila, ada beberapa tips yang menurut saya penting untuk diperhatikan agar dapat lolos seleksi. Pertama, pahami dengan baik visi dan nilai utama program. Pastikan proposal atau gagasan yang diajukan memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila, kontribusi sosial, dan pengembangan masyarakat. Kedua, tunjukkan keaslian gagasan dan motivasi pribadi. Seleksi tidak hanya melihat kualitas akademik, tetapi juga komitmen dan semangat kontribusi yang dimiliki peserta.

Ketiga, persiapkan dokumen dan proposal secara maksimal. Perhatikan detail penulisan, sistematika, dan argumentasi yang kuat. Proposal yang baik bukan hanya menjelaskan apa yang akan diteliti, tetapi juga mengapa penelitian tersebut penting dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Keempat, jangan takut untuk menunjukkan pengalaman, tantangan, dan perjalanan pribadi yang relevan dengan bidang yang ditekuni. Pengalaman tersebut dapat menjadi nilai tambah yang menunjukkan kesungguhan dan konsistensi kita dalam berkontribusi.

Terakhir, saya ingin mengajak mahasiswa, peneliti muda, dan generasi muda Indonesia untuk tidak ragu bergabung dalam program-program seperti Dana Darma Pancasila. Kesempatan seperti ini bukan hanya tentang mendapatkan pendanaan, tetapi juga tentang membangun kapasitas diri, memperluas jejaring, dan memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa. Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, semangat toleransi, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Melalui Dana Darma Pancasila, saya belajar bahwa kontribusi besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba. Saya berharap semakin banyak anak muda Indonesia yang berani membawa gagasan, penelitian, dan inovasi mereka untuk kemajuan bangsa. Dengan kolaborasi, semangat belajar, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, kita dapat bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih inklusif, toleran, dan berdaya saing di masa depan. ***



OPINI

Inovasi Sains dan Teknologi Pertanian Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh **Retno Sri Endah Lestari**

Ketua Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI)

Dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim yang dinamis, peran penting inovasi sains dan teknologi pertanian menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sistem pangan di Indonesia. Inovasi pertanian mencakup pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan pangan di masa depan.

Salah satu bentuk inovasi yang signifikan adalah penerapan teknologi pertanian cerdas (*smart agriculture*). Teknologi ini meliputi penggunaan sensor tanah, sistem irigasi otomatis, drone untuk pemantauan lahan, serta aplikasi digital untuk manajemen pertanian. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2023), teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 30 persen, dan mengurangi pemborosan sumber daya seperti air dan pupuk. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, 2024) menegaskan bahwa pemuliaan tanaman berbasis bioteknologi dapat meningkatkan hasil panen hingga 20 persen dibanding metode konvensional. Namun perlu diperhatikan juga, sistem birokrasi pemberian izin edarnya tidak boleh terlalu lama, namun harus efisien dan efektif.

Namun, tantangan utama dalam penerapan inovasi pertanian adalah keterbatasan akses petani terhadap teknologi, modal, dan informasi. Kesenjangan digital antara petani di daerah maju dan tertinggal menjadi hambatan serius dalam pemerataan manfaat inovasi. Menurut Kementerian Pertanian (2023), lebih dari 45% petani kecil di Indonesia masih belum memiliki akses terhadap platform digital pertanian. Oleh karena itu, secara keseluruhan, diperlukan peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam memperluas jangkauan inovasi pertanian yang

merupakan kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan adopsi teknologi modern, Indonesia dapat memperkuat sistem pertanian yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengembangan inovasi pertanian bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan investasi strategis untuk menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.

Terkait dengan hal tersebut, pembangunan sektor pertanian berbasis inovasi sains dan teknologi adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, inovasi sains dan teknologi dalam bidang pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan impor dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan "Strategi Percepatan Ketahanan Pangan", yang mencakup peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, serta pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan selain itu, juga diperlukan peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam mendukung terwujudnya "Ketahanan Pangan Nasional".

Empat Strategi

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan mempunyai peran yang vital bagi kehidupan suatu bangsa. Mengingat pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional, Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya menjaga ketahanan pangan tersebut melalui empat strategi, yaitu:

1. Mendorong pemanfaatan digitalisasi dari pasar, serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.

2. Menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan, melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain.
3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan, melalui budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices) dan penanganan pascapanen yang baik (good handling practices), pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Pemenuhan Sanitary serta Phytosanitary (SPS) yang akan terus dijaga.
4. Menjaga ketahanan pangan serta keberlangsungan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi.

Basis pengembangan *food estate* melalui korporasi, bertujuan agar petani berkelompok, dalam bentuk koperasi atau gapoktan, sehingga lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah dan bekerjasama dengan BUMN maupun swasta. Menurut keterangan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P, M.M, M.H (29 Jan.2026), Pemerintah terus memperkuat kebijakan Ketahanan Pangan Nasional sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Sumber Daya Lokal

“Penguatan Ketahanan Pangan harus memperhatikan potensi sumber daya lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat secara berkelanjutan”. Salah satu langkah penting Pemerintah adalah, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Indonesia sendiri memiliki sekitar 76 jenis komoditas karbohidrat alternatif yang dapat dikembangkan sebagai pengganti nasi. Ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang berorientasi pada pasokan dan stabilisasi, melalui penguatan produksi, perbaikan infrastruktur distribusi, pembangunan sarana jalan, serta penyediaan

fasilitas penyimpanan guna memperpanjang umur simpan komoditas yang rentan terhadap cuaca dan waktu. Gerakan Pangan Murah telah digelar di 13.200 titik yang tersebar di 38 Provinsi untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan.

Badan Pangan Nasional (BPN) juga mencatat bahwa pada akhir Desember 2025, stok beras nasional mencapai 3,3 juta ton, sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan pangan strategis. Dalam rangka pengentasan daerah rawan pangan, program BPN telah berhasil menurunkan jumlah wilayah rawan pangan, dari 83 Kabupaten/Kota menjadi 68 Kabupaten/Kota secara bertahap. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Hal ini penting untuk mengamankan stabilisasi 11 komoditas strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi/kerbau, telur, ikan, bawang putih/merah, cabai dan komoditas penting lainnya.

Sesuai tugas dan fungsi BPN dalam menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional untuk menjamin ketersediaan pangan, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka BPN juga mendukung penuh program “Makan Bergizi Gratis (MBG)”, yang diyakini dapat mendorong para petani dan pelaku usaha pangan semakin berdaya guna dalam membangun desa melalui peningkatan produksi dan distribusi komoditas pertanian. ***



OPINI

Manusia Indonesia Merdeka di Era Digital

Oleh **Laode M. Kamaluddin**

Rektor Universitas Insan Cita Indonesia (UICI)

Kemerdekaan adalah hak asasi yang paling fundamental dalam kehidupan umat manusia. Walaupun demikian, manusia merdeka pada dasarnya adalah manusia yang dalam dirinya sudah ada unsur-unsur molekuler yang dibentuk oleh sel-sel jaringan yang membawa energi statis yang bebas dan membentuk gelombang-gelombang elektromagnetik yang tersusun dalam suatu arsitektur jaringan sel-sel saraf kita kenal dengan istilah *Neuro Science*. Dalam ilmu *Neuro Science* ditemukan jumlah jaringan sel dalam tubuh manusia terdapat sekitar 5000 Triliun sel. dan ada sekitar 3000 Triliun sel-sel saraf terletak di kepala manusia (Tony Buzan dalam Brain Mapping, 1970-an). Dikemudian hari ditemukan bahwa setiap sel dalam jaringan neurons mempunyai muatan listrik sebesar 1,4 Volt. Jadi, betapa besar muatan listrik dalam tubuh manusia. Jika perkalian 1,4 Volt x 5000 Triliun sel dalam jaringan, maka terdapat 7000 Triliun Volt energi yang menggerakkan kehidupan manusia.

Energi yang begitu besar dalam tubuh manusia tersusun rapi dalam jaringan neurons yang terpusat pada satu simpul sel yang ada di kepala manusia dan secara ajaib pusat kontrol sel ini mengatur elektron dengan gelombang listrik yang menerima informasi berupa persepsi manusia bernama neuron sensorik atau *afferent neuron*.

Dengan demikian memperhatikan manifesto manusia Indonesia merdeka di era digital pada hakikatnya kita membahas tentang kemandirian dari neuron sensorik menerima dan mengirim energi gelombang yang diterima atau mengirim sinyal pesan secara mandiri dan menjadi tuan dalam dirinya sendiri. Secara umum dikatakan bahwa "Manusia Indonesia Merdeka" era digital adalah individu yang merdeka secara kognitif, *affective*, dan *skill* yang tinggi; mampu berpikir kritis di tengah banjir informasi, sekaligus mampu secara bijak dalam menggunakan teknologi untuk memperkuat

persatuan, kedaulatan bangsa dan secara sosial keadilan untuk keadilan bagi seluruh individu rakyat Indonesia sebagai hak asasi yang melekat pada setiap warga negara.

Uraian singkat di atas adalah fondasi dasar dari Manifesto Manusia Indonesia Merdeka di Era Digital. Untuk memahami kondisi hari ini dan perspektif perkembangan digital ke depan, maka kita perlu memahami lebih dahulu tentang ekosistem digital karena diperkirakan perkembangan ke depan adalah ekosistem yang diwarnai oleh *Technology Digital*, Power Politik yang didikte oleh teknologi digital dan lahirnya ekonomi digital. Eksosistem ke depan adalah tatanan atau era yang disebut "*The New Global Digital Economic Order*". Ini berarti bangsa Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 barulah pembebasan atau dari penjajahan secara fisik. Era sekarang ini telah mengalami evolusi menjadi kolonialisme algoritmik dan disrupsi informasi. Di era dimana algoritma menentukan apa yang kita lihat, percayai dan perjuangkan, kemerdekaan yang hakiki berarti kebebasan berpikir jernih dan berdaulat di ruang digital.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ruang digital adalah lingkungan maya (virtual) atau ekosistem daring yang menghubungkan individu, organisasi, dan pemerintah melalui internet dan teknologi komputer. Infrastrukturnya melalui lahirnya perlombaan pembangunan infrastruktur ekosistem satelit berbasis kedaulatan dan kemandirian bangsa. Hari ini satelit komunikasi, navigasi untuk keselamatan dan keamanan serta *Remote Sensing* menjadi penentu kemerdekaan suatu bangsa. Apakah bangsa tersebut merdeka sebagai bangsa yang mandiri atau bangsa yang menjadi pengikut atau terjajah oleh teknologi infrastruktur yang dimiliki perusahaan bangsa lain, yang lebih kejam untuk lebih jelasnya kita dapat melihatnya secara transparan pada peranan infrastruktur bernama

satelit dalam perang Iran vs USA dan Israel memberi kita pencerahan, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya memiliki infrastruktur satelit untuk kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia di bidang teknologi.

Dengan pemahaman dasar mengenai ruang digital tersebut, maka manifesto manusia Indonesia Merdeka di era digital perlu kita bangun. Untuk itu kita harus mulai dari Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Manifesto paling dasar yang menyatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini dipertegas lagi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menekankan pada konsep "Merdeka lahir dan batin" yang kemudian menjadi dasar pendidikan manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan adanya penegasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka "Manusia Indonesia Merdeka" di era digital adalah individu yang merdeka secara kognitif yang mampu berpikir kritis di tengah banjir informasi yang begitu dahsyat sekarang ini. Oleh karena itu "Manusia Indonesia Merdeka" ialah manusia yang bijak menggunakan teknologi informatika untuk memperkuat persatuan. Dan kedaulatan bangsa dengan tujuan untuk kebahagiaan bangsa Indonesia melalui tujuan seperti terumuskan dalam lima sila Pancasila yaitu jaminan bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, memperjuangkan Persatuan Indonesia melalui Musyawarah untuk mufakat dalam perwakilan sebagai bentuk tata kelola kenegaraan yang muaranya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Manusia Indonesia merdeka di era digital tidak lagi menjadi penonton pasif atau menjadi konsumen konten media sosial yang pasif tapi harus tampil menjadi pencipta dan pengabdian yang aktif. Ditangan generasi digital (Gen Z dan Alpha) yang jumlahnya makin dominan dalam masyarakat Indonesia, media sosial atau medsos bukan lagi sebagai ajang hiburan. Medsos harus digunakan sebagai ruang untuk membangun gagasan yang diwujudkan dalam bentuk opini, mengekspresikan identitas dan menggerakkan perubahan sosial.

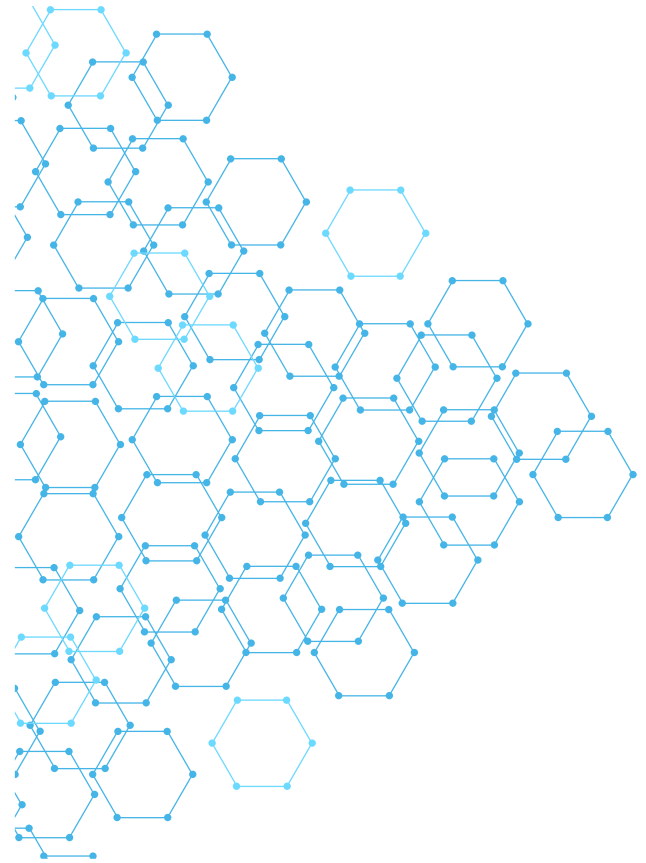
Sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila yang tidak saja menjadi dasar bernegara tapi juga menjadi wujud kebahagiaan Manusia Indonesia Merdeka. Untuk itu maka visinya adalah tercermin dalam suatu rumusan "ABC + BEM" yang menjadi komitmen Manusia Indonesia Merdeka. Penguasaan terhadap *Science, Technology, Engineering* dan Matematika (STEM) menjadi mutlak untuk dijadikan jembatan imajinasi untuk melahirkan generasi Manusia Indonesia Merdeka di Era Digital. Oleh karena itu literasi digital dan kompetensi digital harus disusun dalam kurikulum pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar dan menengah sampai Perguruan Tinggi. Adapun dasar-dasar pengetahuan dan moralnya tercermin dalam jargon "ABC + BEM". Jargon "ABC + BEM" yaitu: *Artificial Intelligence, Big Data, Connectivity*, ditambah dengan teknologi *Blockchain* yang bersandar pada etika dan moral value dari teknologi digital. Jadi perkembangan digital tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut maka pemerintah wajib membangun infrastruktur digital yang dapat menjangkau seluruh desa, pulau-pulau kecil dan terluar untuk memastikan akses informasi yang merata sebagai fondasi keadilan sosial dan demokratis.

Dalam konteks ini dibangunnya teknologi satelit milik nasional untuk memastikan bahwa keamanan (*safety*), pertahanan (*security*) bangsa terjamin. Satelit nasional untuk tujuan kedaulatan, komunikasi internet, navigasi untuk kelancaran logistik dan *Remote Sensing* untuk tujuan mitigasi pemantauan kerusakan lingkungan, seperti kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan lindung untuk manajemen ketersediaan air, perubahan iklim, industri maritim dan untuk menjamin *food security*.

Disamping hal-hal penting yang telah diuraikan, Era Digital sangat menantang terutama pembangunan para bijak baru dengan budaya digital yang berbeda sama sekali dengan budaya analog yang bersandar pada cara berpikir linier yang kontinyu, sementara budaya digital adalah budaya deskriptif, sehingga lahir istilah *connecting the dots path to understand the relationship between different, seemingly unrelated facts, events, or pieces of information to see the "big picture" or understand a hidden pattern*. Untuk memahami hal di atas maka kehadiran data yang

reliable dan akurat sangat penting dan menentukan. Disinilah peran dari Algoritma Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI) yang dikoneksikan dalam data warehouse data yang disimpan diberi nama *clean data warehouse*. Di luar itu dimana datanya tidak real meliputi hoax atau tidak akurat dengan kata lain hoax adalah informasi, kabar, atau berita bohong yang sesungguhnya tidak benar tapi direkayasa dan disebarakan agar terlihat seolah-olah benar dan sah.

Sebagai penutup dari uraian panjang lebar tentang Manifesto Manusia Indonesia Merdeka di era digital, dapat dikatakan bahwa manifesto harus dipandang sebagai tekad yang bulat dari manusia Indonesia Merdeka harus mengambil inisiatif sebagai aktor utama dan bukan penonton sejarah perubahan dari analog ke budaya digital. Kemerdekaan kini diukur dari seberapa berdaulat dalam berpikir, seberapa etis kita bertindak di ruang digital yang maya, dan seberapa kuat kita bersatu melawan hoax dan disinformasi. Untuk itu, generasi Z dan Alpha harus mengikrarkan diri tentang kemerdekaan kognitif; kebebasan untuk berpikir jernih dan independen di tengah jeratan algoritma. ***



“Kemerdekaan kini diukur dari seberapa berdaulat dalam berpikir, seberapa etis kita bertindak di ruang digital yang maya, dan seberapa kuat kita bersatu melawan hoax dan disinformasi.”



OPINI

Sekolah Kebangsaan BINEKA

Oleh **Ansel Da Lopez**

Pengurus Aliansi Kebangsaan

Sebagai sebuah jejaring sosial kebangsaan lintas kultural dan keyakinan, banyak masalah kebangsaan telah menjadi perhatian Aliansi Kebangsaan di bawah pimpinan ketuanya, Pontjo Sutowo, untuk diatasi dari akarnya. Semangat Aliansi Kebangsaan adalah, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak sekedar ritual atau hafalan, tapi menjadi ideologi kerja nyata dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Aliansi Kebangsaan, Indonesia harus kembali ke citra dan vita negara Pancasila.

Dengan Pancasila yang sudah kita sepakati bersama sebagai dasar negara, kemerdekaan hendaknya bukanlah sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jembatan emas untuk mencapai masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Di antara berbagai program kebangsaan yang telah dilakukan, salah satu yang sedang berlangsung adalah memberikan bantuan dana pendidikan kepada para mahasiswa S2 dan S3 yang diseleksi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, agar menghasilkan karya-karya yang berkualitas dalam memperkaya pemahaman tentang Pancasila dalam tiga ranah utama pembangunan bangsa: yaitu tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera. Dilaksanakan melalui Yayasan Dana Darma Pancasila (DDP), program DDP tersebut telah memasuki tahap ketiga, dan akan terus berlangsung.

Sekolah Kebangsaan

Sebagai kelanjutan DDP, kini sedang dipersiapkan penyelenggaraan program Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia Merdeka (Bineka). Program guna membangun Manusia Indonesia Merdeka, yakni manusia Indonesia yang berpikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka, ini akan diselenggarakan oleh Yayasan DDP, dengan bekerjasama dengan beberapa jejaring strategis

Aliansi Kebangsaan, antara lain: Forum Rektor Indonesia, FKPP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Akademi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), dan lain-lain.

Bagi Aliansi Kebangsaan, kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan 80 tahun lalu hendaknya bukan hanya sekedar membebaskan bangsa dari penjajahan; bukan sekedar lepas dari penjajahan fisik atau struktur eksternal; melainkan harus menjadi sebuah proses mendalam untuk memerdekakan manusia Indonesia dari belenggu mental, cara berpikir, dan ketergantungan struktural yang masih diwarisi semangat kolonialisme.

Kemerdekaan yang diproklamkan harus melahirkan anak-anak bangsa sebagai subjek yang utuh, yang mampu berpikir kritis, bersikap mandiri, dan bertindak secara sadar demi kebaikan bersama, dalam rangka tanggungjawab kebangsaan dan kemanusiaan. Kemerdekaan yang diproklamkan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir. Tetapi sebagai jembatan emas menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sekolah Kebangsaan Bineka yang kini sedang dipersiapkan, dan akan segera dilaksanakan secara berjenjang, diharapkan akan menghasilkan lahirnya kader kebangsaan yang berintegritas; terbangunnya jaringan kepemimpinan etis lintas sektor; terimplementasinya proyek perubahan berbasis Pancasila, dan menguatnya narasi kebangsaan yang inklusif dan progresif. Dalam jangka panjang, Sekolah Kebangsaan diharapkan menjadi pusat pembentukan arsitek peradaban Indonesia, yang mampu menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan akar ideologisnya.

Oleh karena itu, masyarakat umum yang tertarik pada pengembangan paradigma Tiga Ranah Pancasila, baik secara ontologi, epistemologi dan

aksiologi, seperti: mahasiswa dan akademisi, aktivis organisasi kemasyarakatan, pemuda lintas sektor, para profesional dan pemimpin publik, serta masyarakat umum yang memiliki komitmen kebangsaan, diharapkan secara sukarela dan bersemangat mengambil bagian dalam Sekolah Kebangsaan ini.

Karena, sekolah Kebangsaan Bineka merupakan investasi peradaban. Tidak hanya membentuk individu, tetapi membangun fondasi moral bangsa. Dalam perspektif Aliansi Kebangsaan, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak sekedar cerdas secara teknokratis, tetapi matang dan visioner secara geopolitik.

Dengan mengintegrasikan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera, Sekolah Kebangsaan Bineka diharapkan menjadi laboratorium pembentukan Manusia Indonesia Merdeka, manusia yang berpikir jernih, bersikap teguh, dan bertindak adil, demi Indonesia yang berdaulat, adil dan bermartabat. ***

Bagi Aliansi Kebangsaan, kemerdekaan Indonesia yang diproklamlirkan 80 tahun lalu hendaknya bukan hanya sekedar membebaskan bangsa dari penjajahan; bukan sekedar lepas dari penjajahan fisik atau struktur eksternal; melainkan harus menjadi sebuah proses mendalam untuk memerdekakan manusia Indonesia dari belenggu mental, cara berpikir, dan ketergantungan struktural yang masih diwarisi semangat kolonialisme.



TESTIMONI PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN BATCH III YAYASAN DANA DARMA PANCASILA



Teungku Nih Farisni

Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Saya mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kebangsaan atas kesempatan berharga menjadi bagian dari Program DDP Batch 3 serta kepercayaan yang diberikan melalui beasiswa Dana Darma Pancasila. Program ini menjadi pengalaman yang sangat bermakna dalam memperluas wawasan kebangsaan, memperkuat kapasitas kepemimpinan, dan membangun jejaring kolaboratif lintas daerah. Selama mengikuti program, saya memperoleh banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang memperkaya cara pandang saya sebagai akademisi dan peneliti di bidang kesehatan masyarakat. Dana Darma Pancasila Batch 3 tidak hanya meningkatkan kapasitas personal dan intelektual saya, tetapi juga memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan inovasi sosial, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ke depan, saya berharap Aliansi Kebangsaan terus menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya generasi pemimpin yang berintegritas, kolaboratif, dan berdampak bagi Indonesia. Saya juga berharap semangat kebangsaan, gotong royong, dan pengabdian yang dibangun dalam program ini dapat terus menjadi energi bersama untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global.

Muzakir Ar

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Motivasi saya mengikuti program ini dilandasi oleh keinginan untuk turut berkontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Dalam perspektif demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui program ini, saya berharap dapat memperdalam pemahaman mengenai dinamika hukum dan demokrasi. Selama mengikuti kegiatan ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan wawasan baru, terutama dalam bidang penelitian, pengembangan analisis hukum, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dan akademis. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan untuk membangun jejaring akademik dan bertukar gagasan dengan para peneliti maupun mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan. Harapan saya ke depan, program ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memiliki manfaat yang besar bagi mahasiswa dan peneliti, khususnya dalam mendukung penyelesaian tugas akhir, pengembangan penelitian ilmiah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik dan penelitian.



Nabella Suraya

Program Doktor Ilmu Kimia Universitas Riau.



Motivasi saya Mengikuti Program Beasiswa Dharma Pancasila adalah karena program ini tidak hanya mendukung pengembangan akademik, tetapi juga memperkuat nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Program ini menjadi kesempatan berharga untuk mengembangkan potensi diri serta belajar bersama orang-orang hebat yang memiliki semangat dan visi untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Selama mengikuti program ini, saya memperoleh banyak pengalaman berharga, mulai dari memperluas wawasan, relasi dengan peserta dari berbagai daerah, hingga bertemu dengan orang-orang hebat dan inspiratif, yang memberikan motivasi untuk terus berkembang. Program ini juga meningkatkan semangat kolaborasi, kepedulian sosial, dan menjadi titik dorong saya untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Melalui Beasiswa Dana Darma Pancasila, saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi, memperluas jejaring positif, serta memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan Indonesia.

Galuh Adi Wijaya

Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Jember

Saya mengikuti Program Beasiswa Dana Darma Pancasila Batch 3 karena memiliki motivasi untuk memperluas wawasan kebangsaan, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan kapasitas akademik yang saya aplikasikan dalam kajian riset saya tentang filantropi islam di Indonesia. Selama mengikuti program, saya memperoleh banyak pengalaman berharga melalui diskusi, pembelajaran, dan interaksi dengan peserta dari berbagai latar belakang. Hormat saya kepada Bapak Pontjo Sutowo, Bapak Manuel Kaisiepo, dan kak Nofia Fitri atas ilmu yang sangat bermanfaat. Serta seluruh jajaran Tim Dana Darma Pancasila yang mengayomi kami dalam setiap tahapan. Program ini tidak hanya sekedar program membantu riset, tapi pengembangan kualitas manusia agar bermanfaat bagi bangsa. Ke depan, saya berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat bermanfaat bagi Keluarga, Masyarakat dan Bangsa Indonesia. Saya juga berharap Program Dana Darma Pancasila terus eksis dalam membantu generasi muda Indonesia menuju Kemerdekaan Berpikir, bersikap dan Bertindak.



Teungku Nih Farisni

Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Saya mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kebangsaan atas kesempatan berharga menjadi bagian dari Program DDP Batch 3 serta kepercayaan yang diberikan melalui beasiswa DDP. Program ini menjadi pengalaman yang sangat bermakna dalam memperluas wawasan kebangsaan, memperkuat kapasitas kepemimpinan, dan membangun jejaring kolaboratif lintas daerah. Selama mengikuti program, saya memperoleh banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang memperkaya cara pandang saya sebagai akademisi dan peneliti di bidang kesehatan masyarakat. DDP Batch 3 tidak hanya meningkatkan kapasitas personal dan intelektual saya, tetapi juga memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan inovasi sosial, khususnya dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ke depan, saya berharap Aliansi Kebangsaan terus menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya generasi pemimpin yang berintegritas, kolaboratif, dan berdampak bagi Indonesia. Saya juga berharap semangat kebangsaan, gotong royong, dan pengabdian yang dibangun dalam program ini dapat terus menjadi energi bersama untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global.

Muzakir Ar

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Motivasi saya mengikuti program ini dilandasi oleh keinginan untuk turut berkontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Dalam perspektif demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui program ini, saya berharap dapat memperdalam pemahaman mengenai dinamika hukum dan demokrasi. Selama mengikuti kegiatan ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan wawasan baru, terutama dalam bidang penelitian, pengembangan analisis hukum, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis dan akademis. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan untuk membangun jejaring akademik dan bertukar gagasan dengan para peneliti maupun mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan. Harapan saya ke depan, program ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memiliki manfaat yang besar bagi mahasiswa dan peneliti, khususnya dalam mendukung penyelesaian tugas akhir, pengembangan penelitian ilmiah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik dan penelitian.



Safrina

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala



Saya Safrina, bekerja sebagai dosen di FH Universitas Syiah Kuala. Pada tahun 2023, Saya melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum di FH USK, dengan disertasi tentang praktik CSR dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan. Penelitian membutuhkan dukungan dana, tawaran dana penelitian dari Yayasan Dana Dharma Pancasila (DDP) sangat sayang untuk dilewatkan walaupun di awal saya sempat ragu, apakah penelitian saya tepat dengan persyaratan yang diharapkan, yaitu riset terkait Pancasila dengan 3 Ranah, yaitu Tata Nilai, Tata Kelola dan Tata Sejahtera. Setelah membaca panduan dengan teliti, saya memahami bahwa yang diharapkan bukan melakukan penelitian tentang Pancasila tetapi memaknai ketiga Ranah sebagai “paradigma akademik untuk memahami masalah bangsa”. Setelah melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, saya dinyatakan lulus sebagai salah satu penerima bantuan penelitian DDP Batch 3. Pengalaman bergabung dengan komunitas yang berupaya untuk “membumikan Pancasila”, merupakan pengalaman yang sangat berharga dan memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan dan mendukung upaya tersebut sesuai dengan pekerjaan dan keahlian saya. Semoga program DDP dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Trims DDPberpikir, bersikap, & bertindak merdeka...

Nani Aisyiyah

Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin

Perkenalkan, saya Nani Aisyiyah, mahasiswa Program Doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin serta penerima bantuan dana penelitian disertasi dari Yayasan Dana Dharma Pancasila. Motivasi saya mengikuti program pelatihan 3 Ranah Pancasila : tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera adalah untuk memperoleh pengalaman baru, memperluas wawasan, serta bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif dan peserta dari berbagai disiplin ilmu. Selama mengikuti program, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan, banyak ilmu baru, serta kesempatan membangun relasi dan berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia. Program ini memberikan ruang pembelajaran yang sangat positif dan membuka cara pandang baru dalam memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan profesi. Harapan saya, ke depan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut melalui pertemuan-pertemuan berikutnya sebagai wadah berbagi ilmu, pengalaman, dan kolaborasi antarpeserta.



Asti Yuliadha

Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Saya mengikuti program ini dengan keyakinan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan perlu disertai komitmen pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial. Selama mengikuti program Dana Darma Pancasila, saya memperoleh dukungan moral dan intelektual yang memperkuat pandangan bahwa penelitian harus dilandasi integritas, tanggung jawab, dan orientasi pada kepentingan bersama. Program ini tidak hanya membantu secara finansial, namun juga menjadi penguat bagi saya untuk terus meneliti dan berkontribusi melalui ilmu pengetahuan. Ke depan, saya berharap hasil riset ini dapat mendukung deteksi dini gangguan psikologis post-stroke, serta memperluas layanan kesehatan yang lebih bermutu dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Saya juga berharap program ini terus melahirkan insan akademik yang unggul, berkarakter, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta memberi dampak nyata bagi bangsa Indonesia.



Agustina

Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Sebagai penerima Beasiswa Bantuan Penelitian dari yayasan Dana Darma Pancasila, saya menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang sudah diberikan. Bantuan ini bukan hanya meringankan secara finansial selama proses penelitian, tetapi juga menjadi motivasi besar bagi saya dalam menyelesaikan penelitian dengan lebih baik, terarah, serta dapat selesai pada waktunya. Lewat program ini, saya mendapatkan peluang untuk memperdalam telaah ilmiah serta mewujudkan penelitian yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata untuk kemajuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas. Bantuan Dana Darma Pancasila dapat merefleksikan dedikasi dalam mendukung generasi muda supaya terus berkarya serta berinovasi, selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Saya sangat berharap program ini berkelanjutan serta memberi manfaat lebih banyak bagi peneliti di waktu mendatang.



Yeny Nasril

Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Motivasi saya dalam mengikuti Beasiswa Program Dana Dharma Pancasila Batch 3 adalah untuk memperoleh dukungan dalam penyelesaian disertasi, serta memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Selama mengikuti program ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, tidak hanya dalam bentuk beasiswa dalam penyelesaian tugas akhir akademik, tetapi juga pembekalan tiga ranah Pancasila yaitu tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera. Kegiatan ini juga mempertemukan saya dengan para awardee dari berbagai daerah dan latar belakang keilmuan berbeda yang turut memperkaya cara pandang saya tentang pentingnya ilmu, integritas, dan kontribusi bagi masyarakat.

Saya berharap program ini terus melahirkan insan akademik yang berkarakter, berwawasan kebangsaan yang mampu memberi kebermanfaatannya nyata bagi bangsa.

Khrisna Agung Cendekiawan

Program Doktor Ilmu Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Perkenalkan, saya apt. Khrisna Agung Cendekiawan, M.Farm., M.Kes, awardee Dana Dharma Pancasila (DDP) Batch 3. Saya sebagai mahasiswa doctor Ilmu Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan fokus riset pengembangan tanaman anti-diare pada suku Osing dengan studi etnomedisin melalui pendekatan skrining fitokimia, molecular docking, serta formulasi tisane polihierbal yang divalidasi efektivitas dan keamanannya secara *in vivo* pada hewan coba. Saya mengikuti program DDP karena memiliki semangat untuk mengembangkan potensi pengetahuan lokal Indonesia menjadi inovasi kesehatan berbasis bukti ilmiah. Selama menjalani program, saya memperoleh banyak pengalaman berharga, mulai dari penguatan kapasitas riset, jejaring akademik yang luas, hingga pembelajaran tentang nilai kolaborasi, integritas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Program ini tidak hanya mendukung pengembangan penelitian saya, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana pengabdian untuk bangsa. Ke depan, saya berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan fitofarmaka Indonesia sekaligus memperkuat pelestarian pengetahuan etnomedisin sebagai bagian dari warisan budaya dan kesehatan nasional.



Febri Fajar Pratama

Program Doktor Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia



Perkenalkan nama saya Febri Fajar Pratama, mahasiswa doktoral Program Studi Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya berdomisili di Kota Tasikmalaya dan berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Motivasi saya mengikuti program beasiswa penelitian Dana Darma Pancasila selain untuk mendapatkan financial support (pembiayaan) juga untuk memperluas koneksi dan memperdalam wawasan mengenai 3 ranah Pancasila. Selama menjalani program terutama pelatihan 3 ranah, saya merasa memiliki tanggung jawab lebih sebagai seorang akademisi sekaligus pendidik, tidak hanya sekedar menyelesaikan studi saja, tetapi juga ikut berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan sehingga bisa berdampak luas bagi masyarakat. Harapan saya kedepannya, Dana Darma Pancasila tetap eksis dan menjangkau lebih banyak para akademisi di seluruh Indonesia yang ingin berkontribusi melalui penelitian-penelitian berkualitas maupun gerakan nyata di masyarakat untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang maju dan paripurna.

Yarmaliza

Program Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Menjadi bagian dari penerima Dana Darma Pancasila (DDP) Batch 3 merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan akademik saya. Motivasi saya mengikuti program ini adalah untuk memperkuat kontribusi penelitian yang tidak hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting berbasis pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Selama menjalani program, saya memperoleh banyak pengalaman, wawasan kebangsaan, serta jejaring kolaborasi yang memperkaya perspektif saya sebagai akademisi dan peneliti. Program ini juga memperkuat semangat saya untuk terus menghadirkan inovasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Ke depan, saya berharap dapat terus menghasilkan penelitian yang bermanfaat, berkelanjutan, dan mampu menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.



Nizan Mauyah

PProgram Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Motivasi saya mengikuti Program DDP untuk mendapatkan bantuan dana penelitian saya sehingga dapat diimplementasikan dengan nilai-nilai Pancasila secara nyata dari penelitian saya mengenai potensi ekstrak daun kari (*Murraya koenigii*) sebagai kandidat obat fertilitas pria, yang selaras dengan sila pertama hingga kelima dari tiga ranah pancasila. Pengalaman saya selama mengikuti program tiga Ranah Pancasila ini, dapat menginternalisasi pengalaman bermakna dari materi terstruktur, dialog kritis antar peserta & kalaborasi berbagai kegiatan memupuk kedisiplinan, serta mengasah kapasitas berpikir analitik dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, pertemuan dengan teman2 inspiratif dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai daerah memperluas jejaring profesional yang menghasilkan sinergi intelektual, membuka ruang kalaborasi antar regional & menumbuhkan peluang pengembangan diri yang berkelanjutan dalam rangka profesionalitas sebagai peneliti. Harapan saya kedepan DDP terus berkembang, memberi manfaat seluas-luasnya, dan dapat membantu secara financial untuk peneliti dari sabang sampai maurake dari seluruh disiplin ilmu. Semoga dari hasil penelitian dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari serta didedikasikan untuk kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Ideologi Pancasila.

Junaidi

Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia

Saya Junaidi, mahasiswa Magister PKn di Universitas Pendidikan Indonesia, yang memiliki ketertarikan pada penguatan karakter generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan dan budaya. Motivasi saya mengikuti Program Dana Darma Pancasila berangkat dari keinginan untuk mengimplementasikan nilai Pancasila melalui penelitian mengenai keterlibatan pemuda dalam pengembangan educational tourism. Program ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan penelitian yang tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga berdampak sosial bagi masyarakat. Selama menjalani program, saya memperoleh pengalaman berharga melalui pelatihan mengenai tiga ranah Pancasila yang sangat relevan dengan bidang keilmuan PKn yang saya tekuni. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian, membangun kolaborasi dengan komunitas budaya, serta memahami pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Kedepan, saya berharap Program Dana Darma Pancasila Batch 3 terus menjadi wadah yang mendukung dan memberikan pendanaan bagi penelitian-penelitian yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila. Saya juga berharap program ini dapat membuka lebih banyak peluang kolaborasi akademik dan pengabdian sehingga hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.



Novia Poni Agustiyani

Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon



Sebagai seorang guru honorer, perjalanan menyelesaikan studi lanjut tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembiayaan riset. Motivasi utama saya mengikuti program Dana Darma Pancasila (DDP) adalah untuk mendapatkan dukungan dalam penyelesaian tesis saya. Saya merasa sangat terbantu dengan bantuan dana penelitian ini yang meringankan beban finansial dalam proses akademis saya. Pengalaman saya selama mengikuti program ini sangat luar biasa. Selain dukungan dana, saya mendapatkan wawasan mendalam melalui pelatihan tiga ranah Pancasila. Pelatihan tersebut memperkaya perspektif saya sebagai pendidik dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan. Harapan saya ke depannya, program DDP ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak peneliti serta pendidik. Semoga ilmu dan bantuan yang saya terima dapat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan agama dan penguatan ideologi Pancasila di lingkungan sekolah.

Riski

Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Motivasi saya mengikuti program ini adalah untuk memperluas wawasan kebangsaan, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta membangun jejaring dengan individu yang memiliki komitmen terhadap pembangunan bangsa. Selama mengikuti program DDP, saya memperoleh pengalaman berharga melalui diskusi kritis, pelatihan, serta interaksi lintas latar belakang. Dari proses tersebut, saya merasakan penguatan nilai-nilai dasar Pancasila, seperti semangat gotong royong dalam kerja sama, penghargaan terhadap keberagaman, serta peneguhan integritas dan keadilan dalam berpikir dan bertindak. Nilai-nilai ini tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik nyata selama program berlangsung. Ke depan, saya berharap dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kontribusi nyata di bidang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan, dan sangat penting untuk tetap seutuhnya mencintai Indonesia.

Izza Madani

Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta



Perkenalkan, nama saya Izza Madani, mahasiswa Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Yogyakarta. Motivasi saya mengikuti Program Dana Darma Pancasila berangkat dari latar belakang saya sebagai putra daerah Aceh, provinsi yang kaya akan sejarah perjuangan, nilai kebangsaan, dan semangat persatuan. Program ini menjadi ruang yang sangat relevan bagi pengembangan tesis saya karena tidak hanya memberikan dukungan penelitian, tetapi juga memperkuat pemahaman kami terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Selama mengikuti program, saya memperoleh banyak pengalaman berharga melalui pelatihan, diskusi, dan kegiatan yang membangun semangat berpikir merdeka, bersikap merdeka, serta bertindak merdeka. Lingkungan belajar yang positif dan fasilitas yang mendukung membuat kami semakin termotivasi untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Harapan saya, program ini dapat melahirkan riset yang berkualitas, berdampak bagi masyarakat, serta mampu membunikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Ival Faris Setiawan

Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Jember



Motivasi utama saya dalam mengikuti program bantuan penelitian dana darma pancasila yakni pertama dengan memilih topik pemberdayaan masyarakat dengan didasari oleh ketertarikan mendalam saya terhadap isu-isu sosial dan pembangunan yang berkelanjutan terutama di sektor pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Saya terlahir dari seorang ibu yang tidak tamat sekolah dasar dan bapak yang hanya tamat sekolah menengah atas dengannya saya bersemangat dalam menempuh ilmu dengan jenjang yang lebih baik untuk keluarga. Penelitian saya bertujuan untuk memberikan kontribusi yang kongkrit dan relevan dalam peningkatan ekonomi dalam penerapan tata kelola kolaboratif yang aktornya juga memerankan masyarakat langsung. Melalui metodologi yang telah saya susun, saya berharap dapat memberikan kontribusi kepada penerapan tata kelola kolaboratif yang efektif dalam keberhasilan dari gaya kepemimpinan. Tujuan utama saya bukan hanya menyelesaikan studi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah maupun setingkat desa yang berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan pengalaman dalam melaksanakan program saya mendapat ilmu yang belum pernah saya dapat sebelumnya secara mendalam yakni terkait tiga ranah pancasila dan sejarah penting dalam wawasan pancasila, sehingga ilmu tersebut relevan dalam mengimplementasikan Terakhir, harapan yang tersampaikan Kedepan Dana Darma Pancasila semoga tambah maju menerbangkan sayapnya dalam menjadi wadah yang memberikan pendanaan secara relevan kepada cendekiawan bangsa.

Pelatihan Tiga Ranah Pancasila



Aliansi Kebangsaan dan Yayasan Dana Darma Pancasila resmi menyelenggarakan pembekalan bertajuk "Tiga Ranah Pancasila" bagi 19 mahasiswa terpilih (6 jenjang S2 dan 13 jenjang S3) yang berhasil lolos seleksi ketat dari total 55 pendaftar untuk menerima Bantuan Riset Dana Darma Pancasila Batch 3 Tahun 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Rabu (22/4/2026) di Jakarta tersebut, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menegaskan bahwa bantuan finansial senilai Rp10 juta untuk S2 dan Rp17,5 juta untuk S3 ini merupakan investasi intelektual agar Pancasila bertransformasi menjadi ideologi kerja yang aplikatif, sekaligus mendorong metode edukasi yang lebih adaptif dan digital bagi generasi muda.



RUBRIK KHUSUS
YUDI LATIF



RUBRIK KHUSUS YUDI LATIF

Dari Negara Non-Blok Menuju Negara Go-blok

Saudaraku, dulu Indonesia berdiri di panggung dunia dengan penuh percaya diri sebagai pemimpin negara-negara Nonblok.

Kita memasuki pergaulan dunia dengan politik bebas aktif yang cerdas mendayung di antara dua karang.

Bebas berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri tak tergantung dan tak memihak blok mana pun. Aktif berarti turut terlibat mengupayakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Kini, Indonesia berdiri di panggung dunia penuh ambigu sebagai pengekor di barisan negara-negara Goblok.

Kita memasuki pergaulan dunia dengan politik terikat-kompulsif. Terikat artinya tersandera oleh pilihan sendiri menjadi sekutu adidaya pembuli. Kompulsif artinya dorongan obsesif untuk terus tampil di panggung internasional sebagai proyeksi dari perasaan rendah diri.

Akibatnya, kita kehilangan akar kewibawaan di barisan negara-negara Nonblok, tapi juga tak diindahkan oleh rekognisi superioritas negara adidaya-yang tetap memandang kita sebagai representasi negara Goblok.

Mungkin inilah tragedi paling sunyi dari sebuah bangsa: bukan ketika ia kalah perang, melainkan ketika ia perlahan kehilangan akal sehatnya sendiri.

Dulu kita mengaku bebas karena berani berpikir merdeka; kini kita sibuk aktif hanya untuk meniru siapa yang paling lantang menggertak.

Di podium internasional kita masih fasih mengucap kata kemerdekaan, perdamaian, keadilan, tetapi dalam praktik kita lebih sering berdiri sebagai pecundang yang senang dielus sebelum disembelih kekuatan perunding dan pemerias.

Maka perjalanan kita terasa ganjil: dari Nonblok yang lahir dari keberanian intelektual, menuju Goblok yang dipelihara oleh kemalasan berpikir. Dan barangkali dunia tidak sedang menertawakan kita-mereka hanya menunggu dengan sabar sampai kita sendiri menyadari betapa seriusnya lelucon yang sedang kita mainkan sebagai sebuah bangsa. ***



RUBRIK KHUSUS YUDI LATIF

Kepemimpinan Moral

Saudaraku, tak ada konstitusi yang bisa dipenuhi imperatifnya tanpa basis moral. Seperti diingatkan John Adams pada para milisi Massachusetts, “Konstitusi kita dibuat hanya bagi orang-orang religius dan bermoral”.

Jauh-jauh hari Prof. Soepomo mengingatkan: “Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.”

Tanggung jawab terpenting pemimpin negara adalah “penjaga konstitusi”. Dalam ketidaksempurnaan konstitusi dan kelembagaan, pemimpin negarawan bisa menutupinya dengan kewibawaan moral.

Dalam kaitan itu, Lyndon B. Johnson mengingatkan, “Tugas terberat seorang presiden bukanlah mengerjakan apa yang benar, melainkan mengetahui apa yang benar.” Tanpa tahu apa yang benar, seorang presiden seolah telah berbuat banyak, tapi menyimpang dari prinsip dan tata kelola yang benar.

Untuk mengetahui apa yang benar, presiden harus menemukan panduan dari norma fundamental. Bahwa praktik demokrasi harus disesuaikan dengan mandat konstitusi karena pengertian “demokrasi konstitusional” tak lain adalah demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Setelah mengetahui apa yang benar, Presiden harus bisa bertindak benar dengan integritas moral tak mudah goyah. “Sebagai presiden,” seru Abraham Lincoln, “Aku tak punya mata kecuali mata konstitusi.” Dengan mata konstitusi, presiden bisa mengetahui apa yang benar. Dengan integritas moral, presiden bisa bertindak benar, yang bisa mewariskan standar etis dalam kehidupan republik.

Hidup ini pendek, sedang kehidupan itu panjang. Maka, janganlah demi kepentingan penghidupan-kekuasaan jangka pendek, kepemimpinan mengorbankan prinsip-prinsip kehidupan jangka panjang.***



RUBRIK KHUSUS YUDI LATIF

Demokrasi Dekaden

Demokrasi sering disebut dalam konotasi positif. Namun, yang lebih berkembang di negeri ini sisi negatifnya.

Aristoteles membagi sistem pemerintahan ke dalam tiga kategori. Pada setiap kategori, ada bentuk yang baik, ada yang buruk. Pemerintahan oleh satu orang: yang baik, kerajaan; yang buruk, tirani. Pemerintahan oleh sedikit orang: yang baik, aristokrasi; yang buruk, oligarki. Pemerintahan oleh banyak orang: yang baik, polity; yang buruk, demokrasi.

Polity adalah sistem pemerintahan oleh banyak orang dengan dukungan kelas menengah terdidik yang besar. Sedangkan demokrasi adalah pemerintahan oleh banyak orang dengan kehadiran rakyat miskin tak terdidik yang besar.

Aristoteles cenderung memilih pemerintahan oleh banyak orang karena, "yang banyak lebih sulit terkorupsi ketimbang yang sedikit" bak samudera yang tak mudah tercemar. Meski begitu, ia tak menghendaki keliaran demokrasi.

Dalam bahasa Yunani, kata 'demos' bisa berarti rakyat (*people*), bisa juga berarti 'kerumunan jelata' (*mob*). Menurut Aristoteles, dalam demokrasi dengan kaum miskin yang besar, pemerintahan mudah jatuh pada logika kerumunan. Bagi kaum miskin "terlalu sedikit yang dipertaruhkan" (*too little to lose*). Hak suara bisa mudah dipertukarkan dengan kepentingan segera.

Sebaliknya, pemerintahan juga sangat riskan bila dikuasai segelintir oligarki. Oligarki hartawan, menurutnya, terlalu banyak yang harus dilindungi.






Yang ideal itu *polity* dengan dukungan kelas menengah yang besar. Di sini, rasionalitas dan keseimbangan politik terjaga dengan nalar dan keterlibatan aktif warga dalam mengemban hak dan kewajiban kewargaan.

Indonesia memang tak bisa menunggu kehadiran kelas menengah yang besar untuk mengusung pemerintahan. Yang bisa dilakukan adalah memasang sabuk pengaman, agar pemerintahan tak terjerebab pada pragmatisme kerumunan atau dikendalikan oleh oligarki.

Para pendiri bangsa sudah bisa mengendus kemungkinan itu, dan secara visioner telah merancang sabuk pengamannya dengan memilih "sistem sendiri": sistem demokrasi Pancasila yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, dengan sistem perwakilan yg mengakomodasi segala unsur kekuatan rakyat yang menjelma dalam MPR.***



Media :

-  [aliansi_kebangsaan](#)
-  [Jaring Cendekia](#)
-  [Forum Kebangsaan](#)
-  [Tiga Ranah Pancasila](#)
-  [Aliansi Kebangsaan](#)

Narahubung :

Indri Ayu - 0812 9025 4794

Alamat Sekretariat :

Residence 2 Lt. 2 Komplek Hotel Sultan Jl. Gatot
Subroto, Jakarta 10270
Telp : 021-5704632/33

Email : kontak@aliansikebangsaan.org
Website : www.aliansikebangsaan.org